

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MENGAPLIKASIKAN VISI DAN
MISI DI MADRASAH ALIYAH AL-HIKMAH BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

dalam Manajemen Pendidikan Islam



Oleh

Boni Wijayanti

NPM: 1511030134

Jurusan: Manajemen Pendidikan Islam

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN**

**INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MENGAPLIKASIKAN VISI DAN
MISI DI MADRASAH ALIYAH AL_HIKMAH BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

dalam Manajemen Pendidikan Islam



Oleh

Boni Wijayanti

NPM: 1511030134

Jurusan: Manajemen Pendidikan Islam

Pemimbing I : Dr. Hj. Eti Hadiati, M.Pd

Pembimbing II : Dr. Safari, M.Sos.

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

Dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pendidikan di Indonesia ini, pendidikan cenderung diartikan sebagai usaha sadar untuk membantu perkembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik. Pengelolaan madrasah secara tidak profesional dapat menghambat langkah madrasah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal, dibutuhkan rencana strategis sebagai suatu upaya atau cara untuk mengendalikan sekolah secara efektif dan efisien. Komponen dalam perencanaan strategis paling tidak terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tersebut harus dilakukan oleh pengelola madrasah, agar madrasah memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan visi dan misi di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan mengamati kebijakan di Madrasah Aliyah Al-hikmah Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Pihak yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah ketua yayasan dan kepala madrasah MA Al-Hikmah Bandar Lampung. Kebijakan itu tujuannya untuk meningkatkan bahan baku yaitu guru, peserta didik dan juga fasilitas sarana prasarannya. Pengaplikasian visi dan juga misi yaitu dengan cara memasukkan materi kepesantrenan agar tidak hilang identitas pesantrennya. Kepala madrasah tidak perlu melakukan pengujian lapangan sebab kebijakan tersebut sudah berdasarkan renstra, dan renstra sudah berdasarkan analisis SWOT. Evaluasi selalu dilaksanakan pada saat akhir tahun ajaran supaya dapat mengetahui apakah ada kekurangan dengan kebijakan yang diterapkan sebelumnya dan agar dapat dibenahi kekurangan-kekurangan tersebut yang selanjutnya bisa dijadikan kebijakan di tahun selanjutnya.

Kata kunci : *Kebijakan Pendidikan, Visi dan Misi*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM
MENGAPLIKASIKAN VISI DAN MISI DI
MADRASAH ALIYAH AL-HIKMAH BANDAR
LAMPUNG

NAMA : BONI WIJAYANTI

NPM : 1511030134

JURUSAN : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

FAKULTAS : TARBIYAH DAN KEGURUAN


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Eti Hadiati, M.Pd
NIP. 196407111991032003


Dr. Safari, M.Sos.I
NIP. 197508012002121003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam


Drs. H. Amirudin, M.Pd.I
NIP. 196903051996031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MENGAPLIKASIKAN VISI DAN MISI DI MADRASAH ALIYAH AL-HIKMAH BANDAR LAMPUNG** disusun oleh: **BONI WIJAYANTI, NPM. 1511030134**, Jurusan **MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM** telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada hari/tanggal: **Jum'at/ 28 Juni 2019, Pukul 11.00-12.30 WIB** di Ruang Sidang Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. H. Amirudin, M.Pd.I (.....)
Sekretaris : Indarto, M.Sc (.....)
Penguji Utama : Dr. H. Subandi, M.M (.....)
Penguji I : Dr. Hj. Eti Hadiati, M.Pd. (.....)
Penguji II : Dr. Safari, M.Sos.I (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd
NIP. 195608101987031001

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”¹



¹ Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qu'an dan Terjemahan*, Surat An Nisa ayat 9.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini akan kupersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta dan kasih, perhatian serta motivasi selama studi ini:

1. Kedua orang tuaku Ayah Siswan Eddi dan Ibunda Siti Mesaroh yang sangat aku cintai yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, mengarahkan, memberikan kasih sayang, selalu menyemangati, dan yang selalu menyebutkan namaku disetiap do'anya, serta selalu tabah dan sabar demi kesuksesanku, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan maghfiroh kepada keduanya. Aamiin
2. Saudara-saudaraku tercinta Gigih Rani Wijaya dan Rimbang Hanafi serta kakak iparku Ahmad Syafei yang selalu mendoakan dan mendukung adik mereka tercinta ini baik moril maupun materil selama proses perkuliaan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Keponakan yang sangat aku cinta dan sayangi, Gisya Nursyifa yang selalu menjadi penyemangat bagiku.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendidikku menjadi manusia yang selalu sadar diri, belajar sabar, ikhlas dan pasrah.

RIWAYAT HIDUP

Boni Wijayanti, merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Siswan Eddi dan Ibu Siti Maesaroh. Merupakan 3 bersaudara. Peniulis dilahirkan di Menggala, tepatnya pada tanggal 30 April 1995.

Riwayat Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak Aisiyah Bustanul Atfal, diselesaikan pada tahun 2001, kemudian Sekolah Dasar Negeri 1 Tulungagung, selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gadingrejo dan selesai pada tahun 2010, kemudian penulis kembali melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Nurul Ulum Tulungagung dan selesai pada tahun 2013.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (IAIN RIL) di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Kelas B. Selama menempuh pendidikan di UIN RIL, penulis mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa (MENWA) Batalyon 202/ Harimau Sumatra Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung hingga saat ini penulis terdaftar sebagai anggota aktif, pada tahun tahun 2017 penulis mengikuti kegiatan Sosialisasi Empar Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang bertempat di Swiss Belhotel Lampung bersama Bapak Dahlan Iskan. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sriaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu pada tahun 2018, dan telah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan di SMPN 13 Bandar Lampung yang juga dilaksanakan pada tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Maha suci Allah dengan segala keagungan dan kebesarannya, tiada yang patut penulis ucapkan selain rasa syukur yang mendalam atas limpahan karunia, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan serta pengalaman dari berbagai belah pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak/ibu:

1. Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung
2. Drs. H. Amiruddin, M.Pd.I selaku ketua Jurusan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung
3. Dr. Hj. Eti Hadiati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Safari, M.Sos.I selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dari awal sampai berakhirnya penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Kh. Basyaruddin Maisir, A.M. selaku ketua Yayasan Al-Hikmah Bandar Lampung
6. Abdul Aziz, SH., M.Pd. selaku kepala Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah Bandar Lampung yang telah memberikan kontribusi besar dalam penyusunan skripsi ini serta telah memberikan izin melakukan penelitian.
7. Kedua Orang Tua saya, Bapak Siswan Eddi dan Ibu Siti Maesaroh yang selalu memberikan semangat dan tiada henti mendoakan anak mereka ini untuk dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.
8. Saudara-saudaraku tercinta Gigih Rani Wijaya dan Rimbang Hanafi serta kakak iparku Ahmad Syafei yang selalu mendoakan dan mendukung adik mereka tercinta ini baik moril maupun materil selama proses perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
9. Anggota group “Diskusi K” Desmi Cahyati, Selvi Apriyani, Susilowati, Trinarti, dan Tri Wulan Dari selaku sahabat sekaligus keluarga kedua yang selalu berada disisiku dan selalu mendukung serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini, jasa kalian tidak akan pernah saya lupakan, semoga persahabatan kita tetap terjaga selamanya.
10. Keluarga Besar KKN 231 Tahun 2018 Desa Pemanggilan yang saya sayangi, yang penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu dan yang pasti kalian spesial.

11. Teman-teman seperjuangan MPI B 2015 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dalam penulisan, itu disebabkan karena masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karenanya kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat membantu kami dalam penyempurnaan penyelesaian skripsi di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berdo'a semoga Allah SWT, senantiasa membalas jasa dan budi baik semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Aamiin...

Bandar Lampung, Juni 2019

Boni Wijayanti
NPM. 1511030134

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Fokus Penelitian	7
E. Sub Fokus Penelitian.....	7
F. Rumusan Masalah	8
G. Tujuan Penelitian	8
H. Signifikansi Penelitian	8
I. Metode Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi teori	16
1. Kebijakan pendidikan.....	16
a. Karakteristik Kebijakan pendidikan.....	18
b. Dasar Kebijakan Pendidikan	20
c. Tujuan dan Model-model Kebijakan Pendidikan	20
d. Unsure-unsur Pokok Kebijakan Pendidikan	25
e. Aspek-aspek dan Perumusan Kebijakan Pendidikan	26
f. System Pengambilan Keputusan.....	32
g. Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	34
h. Evaluasi Kebijakan Pendidikan.....	37
2. Visi dan Misi.....	44
a. Pengertian Visi dan Misi.....	44
b. Proses Pembuatan Visi.....	47
c. Menetapkan Misi.....	49
3. Kebijakan Pend. Dalam Mengaplikasikan Visi dan Misi	51
B. Tinjauan Pustaka	52

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	53
1. Sejarah Berdirinya Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah.....	53
2. Profil Madrasah Aliyah (MA) Al Hikmah	55
3. Visi, Misi, Tujuan dan Moto Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah.....	56

4. Data Siswa Dalam Tiga Tahun Terakhir.....	58
5. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	58
6. Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah.....	59
B. Deskripsi Data Penelitian.....	60

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Temuan Penelitian.....	62
1. Kebijakan Harus Disesuaikan dengan Keadaan Masyarakat Madrasah dan Lapangan.....	62
2. Kebijakan Teruji di Lapangan.....	65
3. Dilakukan Evaluasi Secara Berkala	67
B. Pembahasan.....	69
1. Kebijakan Harus Disesuaikan dengan Keadaan Masyarakat Madrasah dan Lapangan	69
2. Kebijakan Teruji di Lapangan.....	71
3. Dilakukan Evaluasi Secara Berkala	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kebijakan Pendidikan

Tabel 3.1 Keadaan siswa Tiga Tahun Terakhir

Tabel 3.2 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.3 Sarana Prasarana yang Ada di Madrasah Aliyah (MA)

Al-Hikmah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Penelitian

Lampiran 2 Pedoman wawancara

Lampiran 3 Pedoman Observasi

Lampiran 4 Foto Dokumentasi

Lampiran 5 Dokumen Pendukung

Lampiran 6 Kartu Konsultasi

Lampiran 7 Surat Tugas Penelitian

Lampiran 8 Pengesahan Seminar Proposal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MENGAPLIKASIKAN VISI DAN MISI DI MADRASAH ALIYAH AL-HIKMAH BANDAR LAMPUNG**. Adapun beberapa uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

Kebijakan adalah terjemahan dari kata *wisdom* yaitu suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang atau kelompok orang tersebut tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain ia dapat perkecualian.

Kebijakan pendidikan menurut Carter V. Good adalah sebagai suatu pertimbangan (*judgement*) yang didasarkan atas sistem nilai (*values*) dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional.

Visi adalah idealisasi pemikiran tentang masa depan organisasi yang merupakan kekuatan kunci bagi perubahan organisasi yang menciptakan budaya dan perilaku organisasi yang maju dan antisipatif terhadap persaingan global sebagai tantangan zaman.

Misi merupakan tujuan utama yang dibentuk oleh orang, tim, atau organisasi. Misi disimpulkan dalam pernyataan yang singkat, jelas dan member

inspirasi yang memusatkan perhatian di dalam satu arah yang jelas dengan manfaat dari keunikan individu, bisnis, atau kelompok.²

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul skripsi ini adalah:

Karena penulis menyadari bahwa dalam mengelola suatu lembaga pendidikan memerlukan kebijakan untuk mampu menciptakan masa depan yang lebih baik. Menciptakan kebijakan pendidikan yang tepat sesuai dengan tujuan sekolah yang tertuang dalam visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan.

C. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses sosial untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan generasi yang dahulu ke generasi selanjutnya agar nilai-nilai pendidikan tersebut tetap terpelihara dan terjaga bahkan butuh dikembangkan. Dengan demikian, keberadaan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan peran pemerintah sebagai penguasa. Hal ini karena kompleksitas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat sangat beragam dan membutuhkan campur tangan pemerintah.

Disamping itu masyarakat memiliki keterbatasan, sedangkan pemerintah memiliki kekuasaan dan kekuatan yang dapat menjamin keberadaan dan keberlangsungan pendidikan. Tidak menutup kemungkinan apabila proses penyelenggaraan pendidikan diwarnai berbagai macam konflik dan pertentangan serta dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang

² Cynthia D. Scott, dkk., *Organizational Vission, and Mission*, terj. Ati Cahayani, *Visi, Nilai, dan Misi organisasi*, (Jakarta: Indeks, 2010), h. 4.

sulit ditangani oleh masyarakat sehingga intervensi pemerintah berupa kebijakan yang diharapkan menjadi solusi terbaik.³

Dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pendidikan di Indonesia dewasa ini, pendidikan cenderung diartikan sebagai usaha sadar untuk membantu perkembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan. Secara lebih umum, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pembimbingan yang diberikan dengan sengaja oleh pendidik kepada peserta didik kearah suatu tujuan tertentu.⁴

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah system pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memerhatikan keberagaman, memerhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Dengan kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemerintahan daerah, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan daerah untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang pengelolaan pendidikan, khususnya bab 14 pasal 50 menjelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidikan, dan penyediaan fasilitas

³ Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 30.

⁴ Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 5.

penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.⁵

Dalam konteks penyelenggaraan desentralisasi di bidang pendidikan tidak hanya terhenti pada tingkat kabupaten dan kota tetapi lebih jauh yaitu sampai pada tingkat sekolah. Dengan adanya pengalihan kewenangan pengambilan keputusan kelevel sekolah diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya.

Otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan lingkungan setempat. Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi agar mereka lebih memahami kompleksitas pendidikan, membantu serta turut mengontrol pengelolaan pendidikan. Adapun kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula mendapat perhatian oleh sekolah. Dengan demikian, sekolah dituntut memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah, karena keduanya merupakan penyelenggara pendidikan di sekolah.⁶

Pengelolaan sekolah secara tidak professional dapat menghambat langkah sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal, dibutuhkan rencana strategis sebagai suatu upaya atau cara untuk mengendalikan sekolah secara efektif dan efisien. Komponen dalam perencanaan strategis paling tidak terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, bab 14, pasal 51.

⁶ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 5.

strategi. Perumusan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi tersebut harus dilakukan pengelola sekolah, agar sekolah memiliki arah kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan yang diharapkan.

Harapan masyarakat pada umumnya telah bergeser dari sekadar memperoleh pendidikan dalam arti pemerataan memperoleh pendidikan kepeningkatan mutu pendidikan, karena dirasakan memperoleh pendidikan dengan mutu seadanya tidak mampu meningkatkan persaingan yang berarti, dan pada gilirannya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan.⁷ Oleh sebab itu, para pengambil kebijakan pada tingkat pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif dalam system otonomi pemerintahan dapat melihat mana kebijakan yang dibutuhkan masyarakat, mana kebijakan yang tepat.

Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang harusnya memihak atas kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan para pengambil kebijakan. Olehnya itu, dibutuhkan pendekatan yang professional baik pada pihak pemerintahan maupun pada pihak sekolah. Dengan adanya perhatian terhadap aspek professional ini maka kebutuhan masyarakat bisa saja terpenuhi atas kesesuaiannya antara kebutuhan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Sekolah harus bisa menunjukkan bahwa urusan pendidikan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, terencana, terkontrol, dan bermutu.

Bicara tentang menciptakan pendidikan yang bermutu maka tak lepas dari visi dan misi dari lembaga pendidikan itu sendiri, semakin kuat visi dan semakin baik misinya akan semakin berkualitas juga sumber daya manusia

⁷ Saiful sagala, "Pengantar", *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung Alfabeta. 2013), h. vi.

yang dapat dihasilkan. Peran dari seorang guru sangatlah penting dan sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan potensi sumber daya manusia dan juga dalam menjalankan visi dan misi sekolah. Setiap pendidik wajib memahami dan mengerti tentang visi dan misi sekolah tempat dia mengabdikan karena semua itu dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar dan menentukan kemajuan dari sekolah, jika pendidik tidak mengerti visi dan misi dari sekolah bias berakibat kemunduran bahkan kegagalan dalam sekolah.

Madrasah Aliyah Al-Hikmah merupakan salah satu sekolah islam swasta yang berbasis pondok pesantren. Di Madrasah Aliyah Al-Hikmah lebih ditekankan pada kurikulum pesantren sehingga tidak menghilangkan identitas kepesantrenannya. Seperti visi dan misi yang ada di madrasah tersebut yaitu “Terwujudnya Lembaga Pendidikan Berbasis Pondok Pesantren yang Unggul dan Berprestasi di Tingkat Nasional Tahun 2021” dan juga salah satu misinya yaitu ” Menyelenggarakan pendidikan pondok pesantren yang berkarakter dan berkualitas”.Kebijakan merupakan bentuk aturan, sehingga dalam pengaplikasian visi dan misi tentunya kebijakan tersebut menjadi pedoman.

Tabel 1.1

Kebijakan pendidikan di MA Al-Hikmah Bandar Lampung

No	Indicator Kebijakan Pendidikan	Skala Penilaian	
		Terlaksana	Belum Terlaksana
1	Harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat madrasah dan lapangan	✓	
2	Telah dilakukan uji coba di lapangan	✓	

3	Dilakukan evaluasi secara berkala	✓	
---	-----------------------------------	---	--

Sumber: Hasil Prasurvei di MA Al-Hikmah Bandar Lampung

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, semua yang berkaitan dengan pendidikan formal dibawah naungan yayasan. Kebijakan yang strategis dibuat oleh: madrasah dan perangkat-perangkatnya, pengurus yayasan, dan komite madrasah.

Dalam membuat kebijakan harus disesuaikan dengan masyarakat madrasah dan juga lingkungan, karena memang kebijakan ditujukan untuk kepentingan masyarakat madrasah baik itu peserta didik karena keberhasilan dalam membuat kebijakan adalah bagaimana mengolah bahan bakunya, maupun gurunya.

D. Fokus Penelitian

Kebijakan Pendidikan Dalam Mengaplikasikan Visi Dan Misi di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung

E. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta judul penelitian yang telah dirumuskan peneliti maka sub focus yang akan diteliti diantaranya:

1. Kebijakan pendidikan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat madrasah dan lapangan
2. Kebijakan telah dilakukan uji coba di lapangan
3. Dilakukan evaluasi kebijakan secara berkala

F. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu penulis untuk mengumpulkan data di lapangan.⁸ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah rumusan masalah deskriptif.

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan di MA Al-Hikmah Bandar Lampung sudah sesuai dengan keadaan masyarakat madrasah dan lapangan?
2. Apakah kebijakan di MA Al-Hikmah Bandar Lampung telah dilakukan uji coba di lapangan?
3. Apakah di MA Al-Hikmah Bandar Lampung dilakukan evaluasi kebijakan secara berkala?

G. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empiric, menemukan kebijakan pendidikan dalam pengaplikasian visi dan misi yang telah dirumuskan oleh MA Al-Hikmah Bandar Lampung. Adapun tujuan khususnya pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan visi dan misi di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung.

H. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 288.

1. Sebagai informasi bagi Kepala Madrasah dalam mencapai tujuan. sehingga kepala madrasah dituntut untuk mampu mengambil kebijakan dengan merumuskan visi dan misi dalam lembaga sekolahnya.
2. Menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan diri dalam penulisan karya ilmiah.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian ilmiah tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang mengungkapkan tentang keadaan atau situasi subyek yang diteliti sesuai dengan fakta saat penelitian dilakukan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan visi dan misi di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah informan atau narasumber yang menjadi sumber penelitian. Subjek yang dianggap paling tahu apa yang peneliti harapkan dalam penelitian ini adalah ketua yayasan, kepala madrasah, dan komite di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung

Sedangkan objek penelitian ini adalah masalah yang diteliti yaitu: “Kebijakan Pendidikan Dalam Mengaplikasikan Visi dan Misi di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung”.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai objek pengumpulan data dalam penelitian ini adalah di MA Al-Hikmah Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, cara menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya.⁹

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi yang berperan serta (*participan observation*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi.¹⁰

a. Pengamatan (*observation*)

Observasi sebagai metode pengumpulan data memiliki cirri yang spesifik bila dibandingkan dengan metode lain, seperti wawancara dan kuisioner. Wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas dengan orang, tetapi juga dengan objek-objek alam yang lain.¹¹

b. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara

⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.100-101.

¹⁰ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 307

¹¹ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 213.

langsung dengan informan. Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara bertatap muka dengan mendengarkan secara langsung informasi.¹²

Penelitian ini penulis menggunakan interview bebas terpimpin agar dalam pelaksanaannya tidak terlalu kaku dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Metode penulis gunakan untuk mewawancarai Ketua Yayasan, Kepala Madrasah dan Komite untuk memperoleh data tentang kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan visi dan misi di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara, bahkan penggunaan dokumentasi dalam suatu penelitian dapat menguatkan hasil observasi dan wawancara sehingga lebih kredibel/dapat dipercaya.¹³

Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari penggunaan dokumentasi, yang mengarahkannya untuk dapat mendokumentasikan hal-hal penting yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dalam mengaplikasikan visi dan misi. Dengan demikian,

¹²*Ibid.*h. 83.

¹³ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 329

teknik pengumpulan data dengan dokumentasi akan sangat mendukung proses penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.¹⁴

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber , dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.¹⁵

Adapun kegiatan analisis data dalam suatu proses penelitian kualitatif ialah mendeskripsikan data. Yang dimaksud dengan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan , maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

¹⁴ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.253

¹⁵ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 333

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.¹⁶

a. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data adalah kegiatan menyajikan data inti/pokok, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan tajam mengenai hasil pengamatan, wawancara, serta dokumentasi. Reduksi data dalam penelitian ini dengan cara menyajikan data inti/pokok yang mencakup keseluruhan hasil penelitian, tanpa mengabaikan data-data pendukung, yaitu mencakup proses pemilihan, pemuatan, penyederhanaan, dan informasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive ia memerlukan kecerdasan dan keluasan serta wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan perkembangan teori yang signifikan.¹⁷

Dengan demikian, agar data menjadi lebih rinci dari data yang banyak perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data dengan meragkum dan mengambil data yang pokok dan penting.

¹⁶*Ibid.* h. 337

¹⁷*Ibid.* h. 338-339

b. Data display (penyajian data)

Setelah data tersebut direduksi, maka langkah seterusnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.¹⁸

Sajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dengan kata lain, penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistemik dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian.¹⁹

c. Conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

¹⁸ *Ibid.* h. 341

¹⁹ Masykuri Bakri, *Metode Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktek* (Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 183

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁰

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

²⁰ Sugiyono, *Op.Cit*, h. 252-253

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (*city*). Dapat ditambahkan, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.²¹

Hakikat kebijakan adalah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan untuk dipedomi oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal.²²

Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan penggabungan dari kata *educational* dan *policy*. Kebijakan adalah seperangkat aturannya, sedangkan pendidikan menunjukkan pada bidangnya. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak terlalu berbeda dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.²³

²¹ Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 75

²² *Ibid.* h.77

²³ Ahmad Rusdiana, *Op.Cit.* h.37

H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho mengatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu.²⁴

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam organisasi hal ini terkait dengan kebijakan pendidikan di sekolah.

Dalam mengelola satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis tentunya merupakan tanggung jawab menteri sebagai system pendidikan nasional memerlukan kebijakan untuk mampu menciptakan masa depan yang lebih baik. Menciptakan kebijakan pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan sehingga mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri dan bertanggung jawab membangun bangsanya.

Kebijakan pendidikan merupakan suatu pertimbangan yang didasarkan atas system nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.

²⁴*Ibid*, h.36

Oleh sebab itu sekolah sebagai lembaga atau organisasi yang melaksanakan pendidikan formal sebagai system pendidikan nasional, harus mampu berperan dalam menentukan masa depan generasi muda. Dalam pelaksanaan system pendidikan diperlukan kebijakan dalam meningkatkan mutu. Sehingga, diperlukan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan keperluan peningkatan mutu sekolah karena di dalamnya berkenaan dengan proses pembudayaan. Proses pembudayaan maksudnya ialah proses memanusiakan anak sehingga potensinya menjadi actual dalam kematangan dan kemandirian hidupnya. Suatu proses yang mampu memenuhi pendidikan anak sebagai kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Untuk itu peranan pendidikan harus terus ditingkatkan sejalan dengan besarnya tantangan yang dihadapi setiap sekolah.

a. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Dalam bukunya Yoyon Bahtiar Irianto karakteristik etika kebijakan dalam konteks manajemen pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pendidikan diperoleh melalui penemuan empiris dengan menggunakan prosedur dan teknik ilmiah.
- 2) Criteria, alat dan prosedur yang dipergunakan dalam menganalisis kebijakan pendidikan bersifat relative untuk setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- 3) Masing-masing implementasi kebijakan pendidikan harus menghasilkan produk dan dampak yang bernilai, baik yang bersifat intrinsic dan ekstrinsik.

- 4) Nilai baik pada setiap situasi implementasi kebijakan pendidikan terletak pada proses aktif.
- 5) Sikap yang baik adalah yakin bahwa kondisi implementasi kebijakan pendidikan pada suatu saat akan bernilai baik dan buruk tergantung apa yang telah, sedang dan akan diusahakan.²⁵

Karakteristik kebijakan pendidikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki tujuan pendidikan; kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
- 2) Memiliki aspek legal-formal; kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut.
- 3) Memiliki konsep operasional; kebijakan pendidikan sebagai panduan yang bersifat umum harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan. Adapun konsep operasional dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a) Dibuat oleh yang berwenang; dibuat oleh para ahli di bidang pendidikan seperti para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan.

²⁵ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 49.

- b) Dapat dievaluasi; kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan memerlukan evaluasi untuk ditindak lanjuti. Jika baik, kebijakan tersebut dipertahankan atau dikembangkan. Jika mengandung kesalahan maka kebijakan tersebut harus diperbaiki.
- c) Memiliki sistematika; kebijakan pendidikan harus memiliki sistematika yang jelas, menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika tersebut dituntut memiliki efektifitas dan efisiensi yang tinggi.²⁶

b. Dasar Kebijakan Pendidikan

Dasar kebijakan pendidikan ditinjau dari segi sosiologis adalah selain sebagai makhluk social, manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan proses pendidikan tersebut harus sesuai dengan hakikat manusia yang bebas. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

c. Tujuan dan Model-Model Kebijakan Pendidikan

1) Tujuan kebijakan pendidikan

Dalam merumuskan kebijakan pendidikan perlu pemahaman tentang pandangan terhadap tujuan kebijakan yaitu (1) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat, (2) tujuan kebijakan

²⁶Ahmad Rusdiana, *Op.Cit*, h.38

dilihat dari tingkatan politisi, (3) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi.²⁷

a) Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan masyarakat

Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan masyarakat, dapat ditelusuri dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. Pendidikan dapat membentuk seseorang menjadi lebih baik setelah ia dididik. Melalui pendidikan diajarkan bagaimana nilai-nilai kebaikan kepada seseorang, sehingga ia mengetahui mana yang baik mana yang buruk. Jadi pendidikan merupakan proses menyempurnakan harkat dan martabat manusia yang diupayakan secara terus menerus.

b) Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan politisi

Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan politisi dapat ditelusuri dari sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan social yang berbeda. Pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warga Negara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis. Selain itu, orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung

²⁷*Ibid*, h.39

jawab terhadap bangsa dan Negara lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan.

c) Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan ekonomi

Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan ekonomi dapat ditelusuri dari kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang dengan alasan sebagai berikut:

(1) Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi,

pendidikan dapat membantu siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup. Secara umum, terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini karena orang yang berpendidikan lebih produktif dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan.

(2) Investasi pendidikan memberikan nilai balik yang lebih tinggi

daripada investasi fisik di bidang lain. Nilai baik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang memasuki dunia kerja.

2) Model-model kebijakan pendidikan

a) Model deskriptif

Model deskriptif menurut Suryadi dan Tilaar adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan untuk penelitian dalam ilmu pengetahuan baik murni maupun terapan untuk menerangkan suatu

gejala yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan menurut Cohn model deskriptif adalah pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan menyajikan suatu “*state of the art*” atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan perlu diketahui para pemakai. Jadi model deskriptif ini dapat menerangkan apakah fasilitas pembelajaran sudah memadai, kualifikasi pendidikan guru memenuhi persyaratan, anggaran untuk pembelajaran dan sebagainya.²⁸

b) Model normative

Model normative merupakan upaya ilmu pengetahuan menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pemauntuk memecahkan suatu masalah. Model normative membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum, dan keuntungan optimum pada investasi public. Karenanya masalah-masalah keputusan normative adalah mencari nilai-nilai variable terkontrol (kebijakan) akan menghasilkan manfaat terbesar (nilai), sebagaimana terukur dalam variable keluaran yang hendak diubah oleh para pembuat kebijakan.²⁹

c) Model verbal

Model verbal dalam kebijakan diekspresikan dalam bahasa sehari-hari, bukan bahasa logika simbolis dan matematika sebagai masalah substantif. Dalam menggunakan model verbal, analisis

²⁸ Saiful Sagala, *Op.Cit*, h. 104.

²⁹ *Ibid*, h.105

bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argument kebijakan, bukan berbentuk nilai-nilai angka pasti.³⁰

d) Model simbolis

Model simbolis ialah model yang menggunakan symbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan variabel-variabel kunci yang dipercaya menciri suatu masalah. Prediksi atau solusi yang optimal dari suatu masalah kebijakan diperoleh dari mode-model simbolis dengan meminjam dan menggunakan metode-metode matematika, statistika, dan logika.³¹

e) Model procedural

Model procedural menampilkan hubungan yang dinamis antara variable-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi-prediksi dan solusi-solusi optimal diperoleh dengan mensimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan yang mungkin.³²

f) Model pengganti dan perspektif

Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif. Model pengganti mulai disadari atau tidak dari asumsi bahwa masalah formal adalah representasi yang sah dari masalah yang substantif. Adapun model perspektif didasarkan pada asumsi bahwa masalah formal tidak sepenuhnya

³⁰ Ahmad Rusdiana, *Op.Cit.*, h.48.

³¹ Saiful Sagala, *Op.Cit.*, h.106

³² *Ibid*, h. 107.

mewakili secara sah masalah substantive. Sebaliknya, model perspektif dipandang sebagai satu dari banyak cara lain yang dapat digunakan untuk menerangkan masalah substantive.

d. Unsur-unsur Pokok Kebijakan Pendidikan

Menurut Yoyon Bahtiar dalam bukunya kerangka analisis yang ditujukan pada proses kebijakan mengandung empat unsure yang harus diperhatikan yaitu:

1) Unsur masalah

Unsur masalah berkaitan dengan bidang-bidang garapan pemerintahan seperti pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, pengembangan wilayah, hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, perpajakan, kependudukan, dan lain-lain. Unsur ini lebih dikenal dengan bidang ideology, politik, social budaya, pertahanan dan keamanan.

2) Unsur tujuan

Unsur tujuan berkenaan dengan sasaran yang hendak dicapai melalui program-program yang telah ditetapkan oleh negara.

3) Unsur cara kerja

Unsure cara kerja berkaitan dengan prosedur logis dan sistematis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

4) Unsur otoritas

Unsur otoritas berkenaan dengan aparaturnya yang diberi kepercayaan untuk melakukan aktivitas pemerintahan.³³

e. Aspek-Aspek dan Perumusan Kebijakan Pendidikan

1) Aspek-aspek kebijakan pendidikan

Aspek-aspek yang harus dikaji dalam analisis kebijakan pendidikan ialah konteks kebijakan itu sendiri. Hal ini karena kebijakan tidak muncul dalam kehampaan, tetapi dikembangkan dalam konteks seperangkat ini, tekanan, kendala, pengaturan struktural tertentu, tanggapan terhadap masalah-masalah tertentu, dan kebutuhan serta aspirasi yang berkembang. Adapun aspek-aspek tersebut ialah:

a) Pelaku kebijakan/actor kebijakan

Actor kebijakan pendidikan dikategorikan menjadi dua, yaitu para pelaku resmi dan pelaku tidak resmi. Pelaku resmi kebijakan pendidikan adalah perseorangan atau lembaga yang secara legal memiliki tanggung jawab berkenaan dengan pendidikan. Adapun actor tidak resmi kebijakan pendidikan adalah individu atau organisasi yang terdiri atas kelompok kepentingan, partai politik, dan media.³⁴

b) Implementasi kebijakan

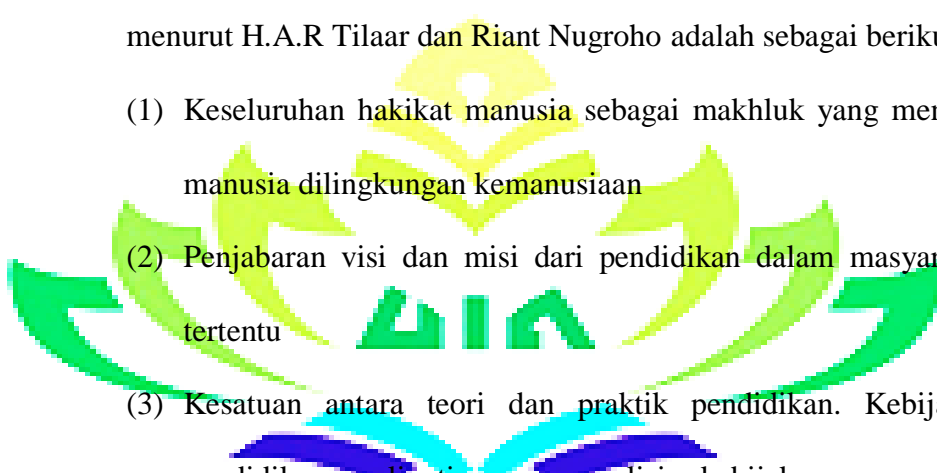
Aspek implementasi merupakan aspek yang paling penting karena aspek inilah yang menjadi tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan.

³³ Ahmad Rusdiana, *Op.Cit*, h. 41

³⁴ *Ibid*, h. 42

Implementasi kebijakan lebih bersifat praktis termasuk didalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Dengan demikian, implementasi kebijakandapat disebut sebagai rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh dalam mewujudkan kebijakan menjadi kenyataan.

Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho adalah sebagai berikut:

- 
- (1) Keseluruhan hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dilingkungan kemanusiaan
 - (2) Penjabaran visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu
 - (3) Kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi.
 - (4) Validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan. Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannyabagi proses pemerdekaan individu, validitas tersebut terdapat di dalam pengembangan pribadinya. Keterbukaan (*openness*). Proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan terjadi dalam interaksi social. Hal ini berarti bahwa pendidikan merupakan milik

masyarakat. Oleh karena itu, suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu didengar

(5) Ditujukan pada kebutuhan peserta didik. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada terbentuknya para intelektual organik yang menjadi agen-agen pembaharuan dalam masyarakat bangsanya.

(6) Diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan pribadinya sebagai pribadi yang kreatif pendukung dan pelaku dalam perubahan masyarakatnya. Kebijakan pendidikan harus memfasilitasi dialog dan interaksi dari peserta didik dengan pendidik, peserta didik dengan masyarakat, peserta didik dengan negaranya, dan pada akhirnya peserta didik dengan kemanusiaan global.

(7) Penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan mencakup rumusan-rumusan yang abstrak, misi pendidikan lebih terarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang konkret. Kebijakan pendidikan bersifat dinamis yang terus-menerus berubah, tetapi terarah dengan jelas.

(8) Berdasarkan efisiensi. Kebijakan pendidikan bukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah laku dalam

pelaksanaan praksis pendidikan. Kebijakan pendidikan harus dilaksanakan dalam masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan. Kebijakan pendidikan yang baik memperhitungkan kemampuan di lapangan. Oleh sebab itu, pertimbangan kemampuan tenaga, tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap, serta didukung oleh kemampuan riset dan pengembangan merupakan syarat-syarat bagi kebijakan pendidikan yang efisien.

- (9) Tidak berdasarkan kekuasaan, tetapi pada kebutuhan peserta didik. Telah kita lihat bahwa pendidikan sangat erat dengan kekuasaan. Menyadari akan hal itu, sebaiknya kekuasaan itu diarahkan bukan untuk menguasai peserta didik, melainkan kekuasaan untuk memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik. Kekuasaan pendidikan dalam konteks masyarakat demokratis bukan untuk menguasai peserta didik, melainkan kekuasaan untuk memfasilitasi tumbuh kembang peserta didik sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif.

- (10) Tidak berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang irasional. Kebijakan pendidikan merupakan hasil olahan rasional dari berbagai alternative dengan mengambil keputusan yang dianggap paling efisien dan efektif, dengan memperhitungkan berbagai jenis resiko serta jalan keluar bagi pemecahannya.

Kebijakan pendidikan yang intuitif akan tepat terarah, tetapi tidak efisien dan tidak jelas arah sehingga melahirkan pemborosan. Selain itu, kebijakan intuitif akan menjadikan peserta didik sebagai kelinci percobaan.

(11) Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. Kebijakan pendidikan yang kurang jelas arahnya akan mengorbankan kepentingan peserta didik. Seperti yang telah dijelaskan, proses pendidikan menghormati kebebasan peserta didik. Peserta didik bukan objek dari proyek pendidikan, melainkan subjek dengan nilai-nilai moralnya. Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan peserta didik, bukan kepuasan birokrat.³⁵

2) Perumusan Kebijakan

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak-pihak tertentu. Demikian pula halnya dengan kebijakan pendidikan, hendaknya harus mempertimbangkan banyak hal, karena menyangkut kepentingan public.³⁶

Kebijakan pendidikan yang dirumuskan haruslah bersifat bijaksana, dalam arti tidak menimbulkan problematika pendidikan baru yang lebih besar dan rumit dibandingkan problem pendidikan

³⁵ *Ibid*, h.43-44

³⁶ M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.63.

yang hendak diatasi atau dipecahkan. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan juga hendaknya memberikan harapan baru bagi warga Negara bahwa mereka dapat menjalani hari esok yang jauh lebih baik setelah kebijakan pendidikan itu diimplementasikan. Serta, kebijakan pendidikan yang dirumuskan haruslah mendorong produktivitas, kualitas, dan perikehidupan bersama dalam bidang pendidikan serta efektif dan efisien.³⁷

Tahap perumusan kebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternative kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternative utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan social, politik, dan ekonomi. Tahap perumusan kebijakan melibatkan aktivitas identifikasi dan atau merajut seperangkat alternative kebijakan untuk mengatasi sebuah permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi tersebut sebagai persiapan dalam penentuan kebijakan akhir.

Perumusan seperangkat alternative akan melibatkan proses identifikasi terhadap berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah serta kemudian mengidentifikasi dan mendesain seperangkat kebijakan spesifik yang dapat mewakili setiap pendekatan. Tahap

³⁷ *Ibid*, h. 64.

perumusan juga melibatkan proses penyusunan *draft* peraturan untuk setiap alternative yang isinya mendeskripsikan mengenai sanksi, hibah, larangan, hak, serta mengartikulasikan kepada siapa atau kepada apa ketentuan tersebut untuk berlaku dan memiliki dampak, dan lain-lain.

f. System pengambilan keputusan

Keputusan merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu diantara beberapa alternative yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Keputusan-keputusan itu dilaksanakan pada setiap kegiatan. Seorang kepala sekolah berhasil dalam memimpin jika ia mampu dalam mengambil keputusan yang tepat dan bermanfaat. Ada beberapa langkah umum pengambilan keputusan, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi masalah
- 2) Menganalisis masalah
- 3) Mengembangkan alternative solusi
- 4) Merumuskan solusi terbaik dan
- 5) Memindahkan keputusan ke dalam tindakan efektif.³⁸

Kemampuan seorang Kepala Sekolah dalam membuat keputusan dapat ditingkatkan apabila ia mengetahui dan menguasai teori dan teknik pembuatan keputusan. Dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam pembuatan keputusan maka diharapkan dapat meningkatkan

³⁸ Engkoswara, *Op.Cit.* h. 107

kualitas keputusan yang dibuatnya, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi.

Pembuatan keputusan diperlukan pada semua tahap kegiatan organisasi dan manajemen. Misalnya, dalam tahap perencanaan diperlukan banyak kegiatan pembuatan keputusan sepanjang proses perencanaan ditujukan kepada pemilihan alternative program dan prioritasnya.

Idealnya Kepala Sekolah dalam kepemimpinannya melekat wewenang dan tanggung jawab menyusun program kerja, melaksanakan dan mengevaluasi dengan mengarahkan personel sekolah dalam melakukan program sekolah. Dijelaskan Morphet bahwa pimpinan setiap organisasi harus mempermudah proses pengambilan keputusan dan komunikasi keputusan terhadap semua anggota organisasi serta masyarakat untuk mendapat dukungan melaksanakan keputusan.³⁹

Dalam pembuatan keputusan tersebut mencakup kegiatan identifikasi masalah, perumusan masalah, pemilihan alternative keputusan berdasarkan perhitungan dan berbagai dampak yang mungkin timbul. Begitupun dalam tahap implementasi atau operasional dalam suatu organisasi, Kepala Sekolah harus membuat banyak keputusan yang telah dilakukan.

³⁹*Ibid.* h. 108.

g. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah dapat dilihat pada bagaimana implementasinya. Rumusan kebijakan yang dibuat bukan hanya sekedar berhenti pada tataran rumusan, melainkan harus secara fungsional dilaksanakan. Sebaik apapun rumusan kebijakan yang dibuat, jika tidak diimplementasikan, tidak akan dapat dirasakan manfaatnya. Sebaliknya, sesederhana apa pun rumusan kebijakan, jika sudah diimplementasikan, akan lebih bermanfaat, apapun hasilnya.⁴⁰

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan belaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Novi Hendra berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan.⁴¹ Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Pada prinsipnya ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan. Pertama, apakah kebijakannya sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijaksanaan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan

⁴⁰ M. Hasbullah, *Op.Cit.* h. 91.

⁴¹ Ali Mufiz, *Pengantar Administrasi Negara*, (Jakarta: Universitas Terbuka Debdikbud, 1999), h. 108.

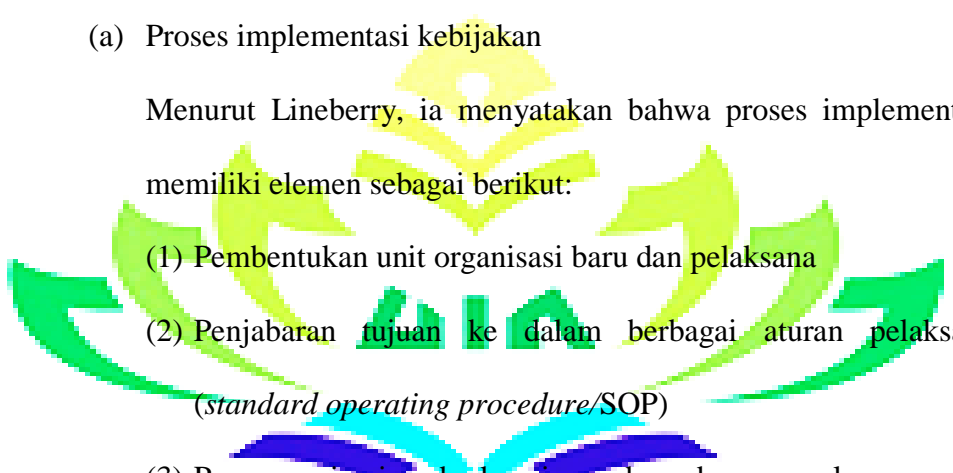
karakter masalah yang hendak dipecahkan. Ketiga, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

1) Konsep Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan jika tidak segera diimplementasikan, tidak dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Dengan demikian, kebijakan hanya akan menjadi rencana bagus yang tersimpan rapi dalam tumpukan arsip-arsip lainnya.

(a) Proses implementasi kebijakan

Menurut Lineberry, ia menyatakan bahwa proses implementasi memiliki elemen sebagai berikut:

- 
- (1) Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana
 - (2) Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (*standard operating procedure/SOP*)
 - (3) Pengorganisasian berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam serta diantara dinas-dinas dan badan pelaksana
 - (4) Pengelolaan sumber untuk mencapai tujuan.⁴²

(b) Factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

(1) Factor rumusan kebijakan

Factor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut

⁴² Ahmad Rusdiana, *Op.Cit*, h.134

kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.

(2) Factor personel pelaksana

Factor yang terletak pada personel pelaksana, yaitu yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan, serta kemampuan kerja sama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personel pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideology kepartaian masing-masing. Semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan.

(3) Factor system organisasi pelaksana

Factor yang terletak pada system organisasi pelaksana, yaitu menyangkut jaringan system, hierarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa digunakan, serta evaluasi yang dipilih.⁴³

⁴³ *Ibid*, h. 138-139

h. Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan menempati posisi terakhir, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan kemudian dievaluasi. Dari evaluasi ini akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan sehingga secara normative akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan tersebut dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan.

Evaluasi juga menilai berkaitan antara teori (kebijakan) dan praktiknya (implementasi) dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Berdasarkan hasil evaluasi pula, kita dapat menilai sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normative, fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban public, terlebih kepada masyarakat yang semakin kritis menilai kinerja pemerintah.⁴⁴

Ada banyak model yang dapat digunakan dalam mengevaluasi program pendidikan (pengembangan kurikulum). Meskipun antara satu dan lainnya berbeda, tujuan yang ingin diperolehnya sama, yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi, yang tujuannya menyediakan bahan bagi

⁴⁴ *Ibid*, h. 173

pengambil keputusan dalam menentukan tindak lanjut suatu program atau pengembangan.

1) Konsep monitoring dan evaluasi

a) Definisi monitoring

Monitoring merupakan fungsi manajemen yang dilakukan pada saat suatu kegiatan sedang berlangsung. Monitoring yang dilakukan oleh seorang pimpinan mengandung fungsi pengendalian. Kegiatan monitoring mencakup penelusuran pelaksanaan kegiatan dan keluarannya, pelaporan tentang kemajuan, dan identifikasi masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan.

b) Evaluasi

Evaluasi menurut Worten dan Sanders adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga, termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai program, produksi, prosedur, serta alternative strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Definisi dan konsep dasar evaluasi merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu atau setelah kegiatan telah berlalu. Evaluasi ini mencakup kegiatan penilaian atas dampak kolektif, baik positif maupun negative dari semua kegiatan yang telah dilakukan di lokasi atau kelompok

sasaran yang berbeda-beda. Deskripsi keluaran dan hasil/manfaat sebagaimana dilihat dari sudut pandang penerima manfaat.

Evaluasi kebijakan juga bervariasi bergantung pada dimensi yang menjadi focus evaluasi. Salah satu dimensi yang sering dapat sorotan adalah dimensi kuantitas dan kualitas. Instrument yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif, seperti tes standar, tes prestasi belajar, tes diagnostic, dan lain-lain. Adapun instrument untuk mengevaluasi dimensi kualitatif dapat digunakan kuesioner, inventori, wawancara, catatan anekdot, dan sebagainya.

c) Monitoring dan evaluasi kebijakan

(1) Monitoring kebijakan

Monitoring ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam usaha menjawab alasan kebijakan/program itu pada suatu tahap dapat menghasilkan konsekuensi yang demikian. Monitoring berhubungan dengan mendapatkan premis factual suatu kebijakan, dengan bergerak mundur dari hal-hal yang diamati sekarang untuk menginterpretasikan yang telah terjadi sebelumnya.

Dun mengatakan bahwa monitoring berfungsi untuk:

- (a) Ketaatan (*compliance*), menentukan tindakan administrator, staf dan semua yang terlibat mengikuti standard an prosedur yang ditetapkan

(b) Pemeriksaan (*auditing*), menetapkan sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi *target group* telah mencapai sasaran

(c) Laporan (*accounting*), menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan social dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijakan sebuah periode waktu tertentu

(d) Penjelasan (*explanation*), menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan akibat kebijakan dan alasan antara perencanaan dan pelaksanaan tidak cocok.

(2) Evaluasi implementasi

Tahap akhir proses kebijakan adalah penilaian mengenai hal-hal yang telah terjadi sebagai akibat pilihan dan implementasi kebijakan. Apabila dipandang perlu, dapat dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang telah dilakukan.

Menghasilkan evaluasi yang akurat bukanlah pekerjaan mudah, apalagi untuk mengubah kebijakanyang didalamnya ditemukan kesalahan yang memerlukan perbaikan segera.

Berbagai kendala yang menghambat evaluasi adalah sebagai berikut:

(a) Kebijakan yang ditetapkan kadang-kadang tidak memiliki tujuan yang jelas, yang diakibatkan pertimbangan politis. Ketidakjelasan tujuan meliputi, tujuan yang tidak mungkin

dicapai, tujuan yang kontradiktif, tujuan yang terlalu sempit atau terlalu spesifik, tujuan antara atau tujuan sementara.

(b) Pengukuran, menyangkut penggunaan konsep tertentu sebagai suatu alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu program.

(c) Kelompok sasaran, yang perlu diperhatikan adalah program meskipun berdampak pada keseluruhan populasi sasaran, belum tentu memiliki dampak terhadap kelompok sasaran. Sering terjadi bukan kelompok sasaran yang memperoleh manfaat program, melainkan kelompok lain dalam populasi tersebut disebabkan bias birokrasi

(d) System nilai yang berkembang di masyarakat. Seorang analis kebijakan terkadang sulit untuk menerjemahkan system nilai tidak dapat diabaikan dalam melakukan evaluasi kebijakan.

(3) Evaluasi dampak kebijakan

Evaluasi dampak berbeda dengan evaluasi implementasi dalam hal waktu. Evaluasi dampak hanya dapat dilakukan secara memuaskan apabila program telah dilaksanakan secara lengkap dan berjalan dalam waktu yang relative lama.

Evaluasi dampak sering bersifat terlalu ilmiah dan cenderung mengabaikan realitas. Akibatnya, muncul beberapa tipe evaluasi yang terlalu baik, tetapi mengandung kelemahan,

seperti anekdot murni, menampilkan data statistic yang terlalu terperinci, berbagai analisis tanpa kesimpulan, argumentasi ahli, dan dominasi intuisi.

d) Dimensi kajian pada studi evaluasi

Kajian dalam studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi berikut:

(1) Evaluasi proses pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan. Pada tahap ini diperlukan dua kali evaluasi, yaitu:

(a) Evaluasi desain kebijakan, untuk menilai alternatif-alternatif yang dipilih sudah merupakan alternative yang paling hemat dengan mengukur hubungan antara biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*), serta yang bersifat rasional dan terukur,

(b) Evaluasi legitimasi kebijakan, untuk menilai tingkat penerimaan suatu kebijakan atau program oleh masyarakat/stakeholder/kelompok sasaran yang dituju oleh kebijakan tersebut. Metode evaluasi diperoleh melalui jejak pendapat, survey, dan lain-lain.

(2) Evaluasi formatif yang dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang berlangsung. Tujuan evaluasi formatif adalah mengetahui seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan berhasilnya. Dalam istilah manajemen,

evaluasi formatif adalah monitoring terhadap pengaplikasian kebijakan. Evaluasi formatif banyak melibatkan ukuran-ukuran kuantitatif sebagai pengukuran kinerja implementasi.

- (3) Evaluasi sumatif yang dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan memberikan dampak. Tujuan evaluasi sumatif adalah mengukur efektifitas kebijakan/program tersebut memberi dampak yang nyata pada problem yang ditangani.⁴⁵

2) Evaluasi formatif

a) Tujuan evaluasi formatif

Evaluasi formatif ditujukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang memiliki ciri-ciri:

- (1) Merupakan evaluasi terhadap program
- (2) Menilai tingkat kepatuhan pelaksana atas standar aturan
- (3) Menggunakan model-model dalam implementasi
- (4) Bersifat kuantitatif
- (5) Melihat dampak jangka pendek dari pelaksanaan kebijakan/program.

Tujuan evaluasi formatif adalah melihat:

- (1) Sebuah program mencapai target populasi yang tepat
- (2) Penyampaian pelayanannya telah sesuai dan konsisten dengan spesifikasi program atau tidak

⁴⁵ *Ibid*, h. 180

(3) Sumber daya yang dikeluarkan dalam melaksanakan program tersebut

b) Aspek-aspek evaluasi formatif

Aspek-aspek kinerja implementasi yang dievaluasi dalam evaluasi formatif adalah:

- (1) *Effort evaluation*: mengevaluasi kecukupan input program
- (2) *Performance evaluation*: mengkaji *output* dibandingkan dengan input program
- (3) *Effectiveness evaluation*: mengkaji pelaksanaannya sesuai dengan sasaran dan tujuan
- (4) *Efficiency evaluation*: membandingkan biaya dengan *output* yang dicapai
- (5) *Process evaluation*: mengkaji metode pelaksanaan, aturan, dan prosedur dalam pelaksanaan.

2. Visi dan Misi

a. Pengertian Visi dan Misi

Visi adalah idealisasi pemikiran tentang masa depan organisasi yang merupakan kekuatan kunci bagi perubahan organisasi yang menciptakan budaya dan perilaku organisasi yang maju dan antisipatif terhadap persaingan global sebagai tantangan zaman.⁴⁶

⁴⁶ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 143.

Visi ditulis sebagai kata benda yang merupakan konsep keadaan organisasi di masa depan. Smith mengartikan visi kurang lebih sebagai wujud masa depan yang mengendalikan rencana strategis. Dengan kata lain, visi merupakan cita-cita organisasi yang diharapkan.⁴⁷

Misi merupakan alasan atau sebab-sebab mengapa sebuah organisasi harus ada. Achmad Djunaedi berpendapat bahwa misi menunjukkan apa yang dilakukan atau daftar dan karakteristik layanan yang diberikan. Dengan demikian, misi ditulis sebagai kata kerja.⁴⁸

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai oleh organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada saat ini dan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, misi harus mencerminkan tentang segala sesuatu untuk bisa mencapai visi, atau dengan kata lain misi adalah penjabaran realistis yang bisa dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi

Visi merupakan cita-cita sekolah sedangkan misi merupakan program untuk mewujudkan visi tersebut. Visi sekolah yaitu tujuan sekolah jangka panjang, bisa lima atau sepuluh tahun kedepan. Untuk mewujudkan visinya, sekolah menyusun misi yang berisi sejumlah program dan kegiatan jangka pendek dan menengah. Visi disusun sesuai kemampuan sekolah, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan tuntutan masyarakat. Secara bertahap visi sekolah harus mengalami kemajuan dan

⁴⁷ Barnawi, *Buku Pintar Mengelola Sekolah*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 52

⁴⁸ *Ibid*, h.54

peningkatan sebagai bukti bahwa sekolah bergerak maju bukan stagnan apalagi mundur.

Visi memotivasi warga sekolah dalam bekerja, melaksanakan program rutin dan program pengembangan. Jika warga sekolah dalam bekerja, melaksanakan program rutin dan program pengembangan. Jika warga sekolah tidak ikhlas dan baik dalam bekerja, maka program tidak akan terlaksana dengan baik, dan berakibat pada kegagalan pencapaian visi sekolah.⁴⁹

Oleh karena itu, visi dan misi sekolah harus dipahami dengan baik oleh setiap warga sekolah mulai dari pimpinan sampai kepada staf terbawah. Seorang pemimpin atau kepala sekolah harus mampu memberikan pemahaman mengenai visi yang hendak dilaksanakan kepada seluruh warga sekolah karena visi dan misi dibuat bukan hanya kepentingan kepala sekolah saja melainkan untuk seluruh warga sekolah. Bersosialisasi tidak cukup hanya dilakukan sekali atau dua kali melainkan harus berkali-kali agar warga sekolah paham betul dan mampu bekerja pada jalur yang benar dalam mencapai tujuan dari perumusan visi tersebut.

Dalam Al-Qur'an, ayat yang menjelaskan tentang visi dan misi adalah ayat yang selalu dibaca dalam do'a yaitu surah Al-Baqarah:201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

⁴⁹ Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), h. 254

Artinya:

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka””.(QS. Al-Baqarah:201)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dalam jangka panjang akhirat sebagai visi hidup sedangkan dunia sebagai misi untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat atau di surga.

Visi seorang muslim adalah ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Visi tersebut tidak dapat terealisasi tanpa adanya misi. Misi seorang muslim di dunia untuk mewujudkan visinya adalah dengan beriman kepada Allah SWT karena sebaik-baik amal dan iman adalah kepada Allah SWT.

b. Proses pembuatan Visi

Pembuatan visi adalah sebuah perjalanan, dari hal yang sudah diketahui ke hal yang belum diketahui. Visi menciptakan masa depan dengan menggabungkan fakta, harapan, impian, bahaya, dan peluang.⁵⁰

Visi sekolah adalah sebuah agenda tujuan prestasi yang harus dicapai dalam aktifitas sekolah. Sejalan dengan itu Beach mengemukakan proses merumuskan visi dimulai dengan ide-ide kreatif atau dengan menciptakan ide-ide baru dengan menggali dari tuntutan lingkungannya. Apabila visi telah dirumuskan dengan baik dan

⁵⁰Cynthia D. Scott, dkk., *Organizational Vission, and Mission*, terj. Ati Cahayani, *Visi, Nilai, dan Misi organisasi*, (Jakarta: Indeks, 2010), h. 3.

sempurna, selanjutnya dirumuskan misi dan statemen misi dijadikan acuan menyusun rencana dan program.

Visi tercipta dari kreativitas piker pemimpin sebagai refleksi profesionalisme dan pengalaman pribadi atau sebagai hasil elaborasi pemikiran mendalam dengan pengikut/personel lain, yaitu berupa ide-ide ideal tentang cita-cita organisasi dimasa depan yang ingin diwujudkan bersama.

Terbentuknya visi dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pendidikan pengalaman professional, interaksi dan komunikasi, penemuan keilmuan serta kegiatan intelektual yang membentuk pola piker (*mindset*) tertentu.⁵¹

Dengan pembuatan visi akan mampu meningkatkan kinerja sekolah, karena visi merupakan inti yang mengendalikan organisasi dan seluruh warga sekolah mengetahui tujuan dan alasan mengapa organisasi dibentuk. Dengan begitu organisasi menjadi kuat dengan komitmen seluruh warga sekolah untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara tepat dan benar begitu visi akan dicapai.

Visi harus dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan *stakeholder* potensial dan kegiatan utama lembaga. Visi dirumuskan dengan kalimat yang mudah dipahami dan menunjukkan suatu keadaan sekolah/madrasah dalam jangka panjang (bisa sekitar 5-10

⁵¹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Op.Cit*, h. 142-143

tahun). Keadaan tersebut dapat diwujudkan dalam ukuran yang kualitatif.

Secara lengkap penyusunan visi yang baik harus:

- 1) Menggambarkan kepercayaan-kepercayaan dan kebutuhan dan harapan *stakeholder* sekolah/madrasah.
- 2) Menggambarkan apa yang diinginkan pada masa yang akan datang.
- 3) Spesifik hanya khusus untuk sekolah/madrasah
- 4) Mampu memberikan inspirasi
- 5) Jangan mengasumsikan pada system yang sama saat ini
- 6) Terbuka untuk dilakukan pengembangan sesuai dengan organisasi yang ada, metodologi, fasilitas, dan proses pembelajaran.⁵²

c. Menetapkan Misi

Misi merupakan tujuan utama yang dibentuk oleh orang, tim, atau organisasi. Misi disimpulkan dalam pernyataan yang singkat, jelas dan member inspirasi yang memusatkan perhatian di dalam satu arah yang jelas dengan manfaat dari keunikan individu, bisnis, atau kelompok.⁵³

Misi merupakan rumusan umum mengenai tindakan (upaya-upaya) yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang jelas akan sangat membantu pencapaian hasil yang efektif, bermutu, akuntabel dan mampu memberikan kepuasan masyarakat, termasuk di dalamnya efisiensi penggunaan anggaran. Pernyataan misi harus menunjukkan secara jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alas

⁵² Barnawi, *Op.Cit*, h. 53

⁵³ Cynthia D. Scott, dkk., *Op.Cit*, h. 4.

an dasar berdirinya organisasi. Dengan demikian misi ini haruslah menyatakan:

- 1) Menunjukkan dengan jelas apa yang dianggap penting dan bidang kegiatan utamanya,
- 2) Mengandung secara eksplisit apa yang akan dicapai dan kegiatan spesifik yang harus dilakukan untuk mencapainya.
- 3) Keterlibatan masyarakat yang luas terhadap bidang utama yang digeluti organisasi.⁵⁴

Dalam pembuatan misi, penting untuk diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan:

- 1) Misi harus mampu menggambarkan sebagai kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut sekolah/madrasah.
- 2) Statemen misi harus berorientasi ke masa depan dan mampu menggambarkan sekolah/madrasah pada masa yang akan datang dengan perpijak pada apa yang telah ada.
- 3) Statement misi harus focus pada pencapaian visi.
- 4) Statement visi bukan sesuatu yang umum, tetapi khusus berlaku untuk sekolah/madrasah tertentu.
- 5) Statement misi merupakan statement yang singkat dan padat tidak lebih dari dua kalimat.⁵⁵

Dengan begitu, misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk

⁵⁴ Engkoswara dan Aan Komariah, *Op.Cit*, h. 138

⁵⁵ Muhaimin, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.166

rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi.

3. Kebijakan Pendidikan dalam Mengaplikasikan Visi dan Misi

Kebijakan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan sangat menentukan arah serta jalur dalam proses itu sendiri. Karena langkah dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pendidikan yang akan diambil, maka hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di sekolah.

Dalam pengambilan keputusan oleh kepala sekolah atau pimpinan sekolah hendaknya memperhatikan beberapa factor lingkungan eksternal, input, proses, output, dan umpan balik. Berkaitan dengan hal tersebut maka kebijakan dapat dipandang sebagai pedoman untuk bertindak dan sebagai bantuan bagi pengambilan keputusan.

Visi dan misi merupakan hal yang mutlak adanya di dalam lembaga pendidikan formal karena visi dan misi adalah imajinasi moral yang mencerminkan profil sekolah yang diinginkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam pengaplikasian visi dan misi yang telah dirumuskan merupakan cita-cita atau suatu rencana jangka panjang yang hendak dicapai maka membutuhkan kebijakan sebagai pedoman dalam setiap proses pelaksanaannya.

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan Nurlindah dengan judul Peranan Manajemen Kebijakan Pendidikan Dalam Mengaplikasikan Visi dan Misi di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa manajemen kebijakan pendidikan di SMK Negeri 1 Bantaeng Kabupaten Bantaeng telah merumuskan kebijakan pendidikan dengan dewan guru, pengurus komite, dan kadang orang tua peserta didik diikut sertakan. Sedangkan visi dan misi dirumuskan oleh tim perumusny seperti Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, bidang hubungan masyarakat, dan pengurus komite sekolah serta *stakeholder*. Dalam pengaplikasian visi dan misi SMK Negeri 1 Bantaeng mencerminkan sebagai sekolah Adiwiyata yang merupakan program berbudaya lingkungan hidup, berwawasan global yang didasari keimanan dan ketaqwaan.

Terdapat perbedaan dan persamaan antara skripsi diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, perbedaannya terletak pada tempat dan variable penelitiannya yaitu penelitian diatas berfokus pada perumusan kebijakan dan implementasi visi misi, sedangkan penulis menjelaskan tentang langkah kebijakan di madrasah.persamaannya terletak pada metode yang dipakai dan jenis penelitiannya.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek

1. Sejarah berdirinya pondok pesantren Al-Hikmah

a. Latar belakang

Pada awal tahun 1989 mulai berdatangan siswa/i yang ingin mengikuti belajar di Madrasah AL-Hikmah (pada waktu itu belum terdapat Pesantren, baru terdapat Madrasah saja), baik dari bandar Lampung maupun dari luar Bandar Lampung, ada yang kost di rumah-rumah penduduk di sekitar Madrasah Al-Hikmah dan ada juga yang oleh orang tuanya diserahkan dan dititipkan untuk tinggal bersama-sama keluarga Bapak KH. Muhammad Sobari, dengan harapan agar dapat mengikuti kegiatan pengajian yang diasuhnya, pada waktu itu rumah kediaman Bapak KH. Muhammad Sobari masih sangat sederhana (gribik) dan hanya ada tiga kamar, itupun tanahnya masih menumpang dengan Bapak Achmad.

Dengan latar belakang tersebut di atas KH. Muhammad Sobari berniat untuk mendirikan Pondok Pesantren yang nantinya dapat menampung siswa/i dari luar daerah yang akan belajar ilmu agama disamping sekolah formal dan dari siswa/i dari kalangan tidak mampu. Al-hamdulillah niat baik KH. Muhammad Sobari disambut positif oleh pengurus Yayasan

lainnya, sehingga dalam perencanaannya sama sekali tidak mengalami hambatan/kendala yang berarti.

Pada tahun 1989 keluarlah Piagam Pondok Pesantren dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung Nomor : 04/PP/KD/1989. Pada tahun 1990 pengurus yayasan mengajukan permohonan gedung asrama santri dan Panti Asuhan kepada Bapak Presiden RI (H. M. Soeharto) dan Al-hamdulillah tahun 1991 permohonan tersebut dikabulkan dengan nilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dananya dibangun gedung asrama santri yang sekaligus berfungsi sebagai Panti Asuhan sebanyak 2 (dua) unit 8 kamar. Sedangkan tanahnya membeli dari Bapak Achmad seluas 800m² dengan cara cicilan dan baru lunas tahun 1997.

Tahun 1991 s/d 1996 kegiatan Pesantren belum maksimal. Hal ini karena berbagai faktordan kendala yang belum teratasi terutama status tanah Pondok Pesantren. Namun Al-Hamdulillah berkat ridho Allah STW tahun 1997 Pondok Pesantren Al-Hikmah dan sejak saat itulah Pondok Pesantren bangkit sampai dengan saat ini. Maka tepatnya tanggal ***1 Muharram 1418 H bertepatan 8 Mei 1997 dideklarasikan sebagai hari lahir Pondok Pesantren Hikmah.***

Waktu terus berlalu bagaikan roda, situasi dan kondisi Pondok Pesantren Al-Hikmah pun tidak terlepas dari suka dan duka silih berganti datang menjelang.

b. Pendirian

Pondok pesantren Al-Hikmah didirikan pada tahun 1989 oleh 4 orang yaitu:

- 1) KH. Muhammad Sobari, Alumni Pondok Pesantren Salafiah Kadukacang Pandeglang
- 2) Ust. Drs. Syamsul Ma'arif, Alumni IAIN Raden Intan Lampung yang waktu itu beliau sedang menjabat sebagai Kepala Mts Al-Hikmah
- 3) Ust. Sujud Suhada, PNS Pemda Propinsi Lampung
- 4) Ust. Drs. H. Basyaruddin Maisir, A.M, Alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur dan Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

2. Profil Madrasah Aliyah (MA) Al Hikmah

Nama : Madrasah Aliyah (MA) Al Hikmah

Kedaton

No Statistik Madrasah : 131218710001

NPSN : 10648356

Akreditasi Madrasah : B

Alamat Lengkap : Jl. Sultan Agung Gg. Raden Saleh No. 23

Kelurahan : Kedaton

Kecamatan : Kedaton

Kota : Bandar Lampung

Provinsi : Lampung

No. Telp. : 0721 - 700992

NPWP Madrasah : 00.812.257.4-323.000

Nama Kepala Madrasah : Abdul Aziz, SH., S. Pd.I.

No. Telp / HP : 081369664183 / 081540882562

Nama Yayasan : Yayasan Al Hikmah Bandar Lampung

Alamat Yayasan : Jl. Sultan Agung Gg. Raden Saleh No. 23

Kelurahan : Kedaton

Kecamatan : Kedaton

Kota : Bandar Lampung

Provinsi : Lampung

No. Telp Yayasan : 0721 - 700992

No. Akte Yayasan : 32

Kepemilikan Tanah : Wakaf

Luas Tanah : 1.200 M²

Status Bangunan : Swadaya dan bantuan swakelola

Luas Bangunan : 800 M²

3. Visi, Misi, Tujuan dan Motto Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah

a. Visi

*“Terwujudnya Lembaga Pendidikan Berbasis Pondok Pesantren yang
Unggul dan Berprestasi di Tingkat Nasional Tahun 2021”*

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan pondok pesantren yang berkarakter dan berkualitas
- 2) Menyelenggarakan pendidikan madrasah yang baik, bermutudan berbasis pondok pesantren
- 3) Mengembangkan kebudayaan nusantara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam
- 4) Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat dan pemerintah
- 5) Membangun kesadaran hidup sehat dan bersih di lingkungan yayasan
- 6) Menyelenggarakan sistem keorganisasian yang tertib, baik dan profesional
- 7) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas

c. Tujuan

- 1) Mempersiapkan generasi yang beriman dan bertaqwa
- 2) Membina generasi yang taat beribadah dan berakhlakul karimah
- 3) Mewujudkan generasi yang ‘alim dan ‘amil
- 4) Mempersiapkan kader ulama dan pemimpin yang responsif
- 5) Membina generasi untuk mengembangkan potensi diri
- 6) Mempersiapkan generasi islami yang cerdas, kreatif, kompetitif dan mandiri.

d. Motto

“Kuat Dalam Aqidah, Beramal Dengan Ilmu, Unggul Dalam Prestasi”

4. Data Siswa Dalam Tiga Tahun Terakhir

Tabel 3.1
Keadaan siswa Tiga Tahun Terakhir

Tahun Pelajaran	Kelas X		Kelas XI		Kelas XII		Jumlah (Kelas X, XI, XII)	
	Jml Siswa	Jml Rombel	Jml Siswa	Jml Rombel	Jml Siswa	Jml Rombel	Jml Siswa	Jml Rombel
2016/2017	120	3	96	3	96	3	260	9
2017/2018	105	3	118	3	98	3	273	9
2018/2019	125	3	86	3	112	3	285	9

Sumber: Dokumentasi MA Al-Hikmah Bandar Lampung

5. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.2

No	Keterangan	Jumlah
Pendidik		
1	Guru PNS diperbantukan tetap	2
2	Guru Tetap Yayasan	26
3	Guru Honorer	0
4	Guru Tidak Tetap	2
Tenaga Kependidikan		
1	Pegawai Perpustakaan	2
2	Tata Usaha	2
3	Penjaga Madrasah	1
4	OB	1
5	Tenaga Keamanan	2

Sumber: Dokumentasi MA Al-Hikmah Bandar Lampung

6. Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah

Untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran, Pondok Pesantren, Madrasah Al-Hikmah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sarana Prasarana yang Ada di Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah

No.	Jenis Prasarana	Jml Ruang	Jml Ruang Kondisi Baik	Jml Ruang Kondisi Rusak	Kategori Kerusakan		
					Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Ruang Kelas	9	7	2	1	1	
2	Perpustakaan	1	0	1		1	
3	Ruang Lab IPA	1	0	1			
4	Ruang Lab Biologi	0	0	0			
5	Ruang Lab Fisika	0	0	0			
6	Ruang Lab Kimia	0	0	0			
7	Ruang Lab Komputer	1	1	0			
8	Ruang Lab Bahasa	1	1	0			
9	Ruang Pimpinan	1	1	0			
10	Ruang Guru	1	1	0			
11	Ruang Tata Usaha	1	1	0			
12	Ruang Konseling	0	0	0			

Sumber: Dokumentasi MA Al-Hikmah Bandar Lampung

B. Deskripsi Data Penelitian

MA Al-Hikmah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang terletak di Jl. Sultan Agung Gg. Raden Saleh No. 23, Kel. Kedaton, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti kebijakan di Madrasah merupakan hasil keputusan bersama antara kepala madrasah, ketua yayasan dan komite madrasah. Yang diputuskan dalam rapat bersama yang disebut dengan rapat pimpinan. Lalu disosialisasikan dengan para guru yaitu melalui rapat pleno. Kebijakan tersebut dibuat tidak hanya mengacu pada peserta didik tetapi juga untuk guru.

Dalam mengaplikasikan visi dan misi yang mengutamakan identitas kepesantrenannya madrasah memasukkan materi-materi keagamaan seperti fiqih, ushul fiqih, akhlak, aqidah akhlak, dan guru juga mengajarkan mereka menggunakan sumber langsung yaitu kitab kuning, untuk fiqih menggunakan fathul qorib dan sebagainya.

Kebijakan telah dilakukan uji coba dilapangan menurut kepala sekolah tidak perlu dilakukan pengujian karena kepala sekolah sudah tahu keadaan di madrasah seperti apa, dilakukan pengujian itu kalau tidak tahu keadaan dilapangan seperti apa atau kalau madrasah itu baru dibangun maka perlu dilakukan pengujian di lapangan.

Evaluasi kebijakan dilakukan di akhir tahun ajaran karena dari evaluasi akan nampak apakah ada kendala-kendala dari kebijakan sebelumnya, maka setelah itu perlu adanya perbaikan untuk kebijakan di tahun yang akan datang.

Dengan begitu perlu dilakukan evaluasi setiap tahunnya, untuk mempersiapkan peserta didik yang berkualitas dan juga mewujudkan lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren yang unggul dan berprestasi di tingkat nasional tahun 2021.



BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

Berikut ini adalah data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap Ketua Yayasan dan Kepala Madrasah di MA Al-Hikmah.

1. Kebijakan Harus Disesuaikan Dengan Keadaan Masyarakat Madrasah Dan Lapangan

Kebijakan pendidikan itu harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat madrasah seperti tenaga pendidik/guru, peserta didik, dan juga harus disesuaikan dengan keadaan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua yayasan, beliau mengatakan kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pada bahan bakunya yaitu anak didik, guru, dan juga fasilitas sarana prasarananya.

“Semua kegiatan sekolah itu berdasarkan kebijakan yayasan, kepala sekolah pelaksanaan. Kalau di yayasan itu kan ada bagian masing-masing. Ada bagian khusus yang menangani pendidikan formal itu berarti khusus dia berkonsentrasi kepada kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan RA, MI, MTs, MA nah itulah dia yang dia lebih aktif untuk mengkoordinirnya namanya kepala bidang pendidikan formal ada juga kepala bidang pendidikan kepesantrenan itu khusus mendampingi tentang masalah kebijakan-kebijakan yang kaitan dengan pesantren itu lebih kepada kurikulum. Kalau merumuskan pendidikan ya tentunya berdasarkan kepada rapat bersama jadi ada rapat namanya rapat pimpinan, rapat yayasan. Rapat pimpinan itu mencakup seluruh kepala sekolah, kepala bidang ketua yayasan. Nah nanti baru rapat secara menyeluruh yaitu pleno, pleno itu sendiri yaitu rapat sosialisasi para guru nah caranya gitu. Jadi yang terpenting untuk kebijakan itu yang pertama yaitu untuk meningkatkan mutu guru, yang kedua yaitu perekrutan peserta didik, peserta didik disini kan dites dulu mau masuk dilihat dulu tesnya jadi ada pengetesannya dulu jadi layak tidaknya anak itu masuk MA berdasarkan hasil tes

kemudian ada mutu guru berarti ada pembinaan guru, nah setelah itu baru ketiga dengan wali jadi antara guru, murid, wali harus bersatu itu untuk meningkatkannya begitu. Diantaranya memang harus lebih meningkatkan kepada bahan bakunya berarti anak didiknya, gurunya kemudian fasilitas sarana prasarannya (sarpras) jadi perpustakaan yang cukup kemudian laboratorium nah itu jadi untuk menuju kesana perpustakaan berarti perpustakaan yang kaitan dengan formal maupun non formal, kajian-kajian kitab kuning kemudian disitu ada bahtsul masail, bahtsul kutub gitu ya kita siapkan sarana prasarana yang berkaitan dengan pendukung itu terutama perpustakaan. Berbasis pesantren maksudnya kurikulum madrasah aliyah kita itu sebagian memang menggunakan kurikulum pesantren kita selip-selipkan disantri contohnya gini seumpamanya materi-materi keagamaan kaya fiqih, ushul fiqih, akhlak, aqidah akhlak, itu beberapa guru kita anjurkan untuk menggunakan sumber langsung kitab kuning bukan menggunakan kitab paket dari kementerian agama kita langsung jadi itu supaya nampak pesantrennya walaupun dia di madrasah aliyah tapi kepesantrenannya nampak berupa belajar kitab kuning sumber langsung fiqh kita menggunakan fathul qorib itu kemudian tasawufnya kita menggunakan kiffayatul atqiya kemudian hadistnya menggunakan kitab at-taisyir jadi kita artinya kualitas madrasah aliyahnya itu dipendidikan agama kita satukan dengan kegiatan pesantren nah itu salah satunya itu”.⁵⁶

Bapak Abdul Aziz selaku kepala madrasah mengatakan kami harus membuat terlebih dahulu rencana strategis, dari rencana strategis itu di dalamnya ada visi dan juga misi lalu dari rencana strategis kemudian diturunkan menjadi kebijakan madrasah.

“Dalam merumuskan kebijakan, pertama kita harus buat dulu yang namanya renstra (rencana strategis) misalkan 2-5 tahun kedepan madrasah ini mau dibawa kemana itu dulu baru nanti di madrasah itu saya turunkin dari renstra, dari sana turunannya dari renstra ya dasarnya itu renstra. Rencana srtrategis itu kan ada visi di dalamnya ada visi ada misi nah saya di turunkan dari rencana strategis baru menjadi kebijakan madrasah. Kita konsisten saja dengan rencana strategisnya dibawahnya itu nanti ada target-targetnya, targetnya yaitu **“Terwujudnya Lembaga Pendidikan Berbasis Pondok Pesantren yang Unggul dan Berprestasi di Tingkat Nasional tahun 2021”** maka kebijakan yang saya lakukan misalnya seluruh mata pelajaran

⁵⁶ Basyaruddin Maisir, wawancara dengan penulis, Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah Bandar Lampung, Bandar lampung, 17 Mei 2019

agama menggunakan sumber langsung misalnya kalau fiqih ya memang dari sumber aslinya bukan dari terjemahan bukan juga dari kutipan. Kalau hadis langsung dari kitab induknya, hadist ya kita buka dari kitab kuningnya bukan dari terjemahan buku kan itu sudah kutipan itu baru berbasis pondok pesantren itu kan berarti *real* dilapangan tapi persoalan kan diguru sekarang tidak semua yang bergelar S.Ag, S.Pd.I bisa walaupun mereka dari PAI dari PBA misalnya maka kemudian kita buat kebijakan untuk guru-guru agama disamping alumni dari UIN juga harus yang dari pesantren karena mereka menguasai kitab-kitab klasik di samping kitab-kitab kontemporer atau buku kan kita perbandingkan misalkan mengajar fiqih, fiqih ini kitab apa yang mau dibuka kalau fiqih yang kemenag kan memang ada yang terbitan tiga serangkai, erlangga memang ada tapi kan itu sudah kutipan nah kita buka saja kitab fathul qorib sehingga anak-anak sudah familiar dengan budaya pembelajaran pesantren dia sudah mengenal huruf-huruf arab yang tak berharakat dan tak berterjemah berartikan di samping itu mereka memperkaya kosa katanya mempelajari sastranya otomatis kan gitu jadi anak itu ngaji kitab diruangan itu, kalau seperti itu kan luar biasa makanya kita perlu guru yang kompeten gurunya itu harus yang alumni pesantren kalau yang S.Ag, S.Pd.I pasti akses bahasa arabnya itu pasti sulit kita harus cari guru-guru yang seperti itu, itu namanya berbasis pesantren. Anak keluar itu udah kompeten dibidangnya maksudnya seperti itu terjemahan dari itu, makanya guru harus bisa mengimbangi, gurunya harus belajar kalau tidak bakal susah gurunya dan anak-anak yang jurusan agama harus diasramakan tidak cukup hanya di madrasah karena di asrama mesti digembleng lagi”⁵⁷.

Berdasarkan indikator kebijakan harus disesuaikan dengan keadaan madrasah dan lapangan, penulis menganalisis bahwa semua kebijakan di madrasah ditetapkan oleh yayasan. Dalam merumuskan kebijakan harus berdasarkan rapat bersama yang kemudian dilanjutkan dengan rapat pleno yaitu rapat sosialisasi para guru. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan bahan baku yaitu anak didik, guru dan juga fasilitas sarana dan prasarana madrasah.

⁵⁷ Abdul Aziz, wawancara dengan penulis, Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah Bandar Lampung, Bandar Lampung, 12 April 2019

Dalam mengaplikasikan visi dan misi, madrasah harus mampu melihat dan memperhatikan perkembangan dan tantangan di masa yang akan datang dan di Madrasah Aliyah Al-Hikmah dalam menetapkan visi dan misi menurut penulis sudah sesuai salah satu contohnya visi di Madrasah Aliyah Al-Hikmah “Terwujudnya Lembaga Pendidikan Berbasis Pondok Pesantren yang Unggul dan Berprestasi di Tingkat Nasional tahun 2021” dan salah satu misinya yaitu “Menyelenggarakan pendidikan pondok pesantren yang bermutu dan berkualitas” dalam pengaplikasiannya kebijakan yang ditetapkan madrasah salah satunya menjaga agar identitas kepesantrenannya tidak hilang yaitu dengan cara menyelip-nyelipkan materi keagamaan seperti fiqih, akhlak, aqidah, aqidah akhlak. Untuk tenaga pengajar/guru mereka dianjurkan menggunakan sumber langsung seperti kitab kuning, untuk fiqih menggunakan kitab fathul qorib dan sebagainya

2. Kebijakan Telah Dilakukan Uji Coba di Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua yayasan, beliau mengatakan bahwa:

“Keputusan berdasarkan pemanfaatan kalau saya kalau yayasan ini kan punya visi misi jadi pedomannya kepada visi dan misi, visi misi yayasan itu apa jadi semua program itu harus mengacu pada visi dan misi jadi tidak boleh keluar dari itu, visi misi itu diantaranya kita lebih menonjolkan dari sisi kepesantrenannya jadi seumpamanya di MA kalau anaknya pinter tapi akhlaknya gak bagus seumpamanya berarti itu belum bagus karena kita mengharapkan orangnya itu berakhlak dan berilmu bukan hanya berilmu tanpa berakhlak juga bukan berakhlak saja tanpa berilmu artinya dua-duanya kita harus mapan, jadi salah satu visi paling kuat yaitu kuat dalam akidah, dalam moral, cerdas dalam berfikir”.⁵⁸

⁵⁸ Basyaruddin Maisir, wawancara dengan penulis, Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah Bandar Lampung, Bandar Lampung, 17 Mei 2019

Menurut kepala madrasah kebijakan tidak perlu di validasi karena memang sudah valid, sudah terjadi di lapangan cukup di evaluasi.

“Kalau kebijakan yang strategis itu dibuat oleh 3 intitas: 1) Madrasah, yaitu kepala madrasah dan tentu perangkat-perangkatnya ada guru ada karyawan ada tenaga pendidik. 2) Pengurus yayasan, 3) Komite madrasah jadi 3 orang ini ngumpul itu nanti akan membuat kebijakan strategis. Komite, yayasan, dan madrasah kalau di swasta ya otomatis kepala madrasah dan para waka terus kemudian melibatkan guru-guru tetap ketua komite dan anggotanya setelah itu ketua yayasan dan pengurus yang lain. Cuma biasanya yang menjadi fasilitator ya 3 orang kepala madrasah, komite dan ketua yayasan yang lain ya ikut aja ikut dalam pengertian kita yang mobilisasi gitu. Kalau kebijakan strategis itu melibatkan komite melibatkan yayasan tapi kalau kebijakan pendidikan saja yang sifatnya satu tahunan sifatnya empat tahunan itu cukup madrasah saja melibatkan para waka dan juga guru. Kalau menurut saya tidak perlu divalidasi cukup dievaluasi saja nanti dipraktekkan dalam satu tahun baru dievaluasi seperti itu. Orang saya membuat renstra itu sudah analisis SWOT, analisis SWOT itu sudah berdasarkan fakta di lapangan, apa selama ini yang menjadi kelemahan? Apa yang selama ini menjadi kelebihan? Kan sudah berdasarkan evaluasi jadi tidak perlu divalidasi orang itu sudah valid sudah terjadi juga di lapangan. Divalidasi itu kalau di lapangan kamu tidak tahu yang terjadi di lapangan baru divalidasi kalau sudah terjadi di lapangan untuk apa divalidasi orang itu sudah valid logika validasinya tidak ketemu karna itu sudah refleksi evaluasi, refleksi kan saya sudah tahu saya buat kebijakan setahun kedepan, saya sudah tau nih selama setahun jadi ya tidak perlu dicoba karena sudah jalan, lalu di cek apa problem anak gimana anak kenapa tidak berprestasi kan sudah tahu penyebabnya terus bagaimana mengatasi kekurangan itu merubah kelemahan menjadi kekuatan, merubah ancaman menjadi peluang, kan saya sudah tahu cuma itu cara baca saya maka kemudian saya melibatkan banyak orang, anggota, komite dan yayasan biar yang baca itu banyak. Mungkin bacaan saya kurang pas maka perlu kita diskusi bagaimana nih menurut yang lainnya kan ada diskusi ada *brainstorming* gitu itu analisis SWOT makanya tidak perlu validasi”.⁵⁹

Kebijakan di MA Al-Hikmah sudah sesuai dengan standarnya yaitu telah dilakukan uji coba di lapangan, hanya saja kebijakan di MA Al-

⁵⁹ Abdul Aziz, wawancara dengan penulis, Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah Bandar Lampung, Bandar Lampung, 12 April 2019

Hikmah bukan melalui pengujian kebijakan secara resmi melainkan melihat dari keadaan madrasah dari tahun ke tahun. MA Al-Hikmah adalah madrasah yang telah berdiri sejak lama, sehingga untuk melakukan pengujian kebijakan secara resmi biasanya dilakukan oleh madrasah yang baru saja didirikan sehingga MA Al-Hikmah tidak perlu lagi untuk melakukan hal tersebut tetapi tetap saja bisa dikatakan kebijakan MA Al-Hikmah telah teruji di lapangan sebelumnya.

3. Dilakukan evaluasi kebijakan secara berkala

Evaluasi merupakan tahap akhir, karena dalam evaluasi ini akan diketahui berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut diterapkan kepada peserta didik, ataukah perlu perbaikan untuk kebijakan selanjutnya.

Evaluasi juga dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan yang dibuat berdampak sesuai yang diperkirakan atau tidak, kebijakan yang dibuat memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat di madrasah. Evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yayasan dan juga madrasah, terlebih pada masyarakat yang ada di madrasah demi kemajuan. Hasil wawancara dengan ketua yayasan, beliau mengatakan bahwa:

“Kebijakan itu otomatis kita lihat juga masukan-masukan dari kepala madrasah dan juga para guru, jadi setiap akhir tahun kita evaluasi, evaluasi yang kemarin bagaimana perjalanan kegiatan proses belajar mengajar kita evaluasi baru kita tetapkan di tahun ajaran yang akan datang contoh yang sekarang kan di akhir tahun ajaran 2018-2019 nanti diakhir ini mau bagi rapor kita ada rapat evaluasi artinya bagaimana kebijakan kemarin berjalan semua apa tidak? kendalanya apa? manfaatnya apa? mudhorotnya apa? baru nanti dibawa lagi di menjelang awal tahun di bulan juli berarti di bulan juli awal sebelum anak masuk kita sudah punya rancangan baru lagi jadi yang kemarin

tidak bisa kenapa tidak bisa, jadi dirumuskan kembali menjadi kebijakan tahun 2019-2020. Kan setiap tahun evaluasi udah dievaluasi perjalanan setahun seperti apa ada yang terbengkalai apa gak kenapa kok terbengkalai kurangnya apa nah itu disitu kita kan perjalanannya sudah lama. Nah kecuali kalau yang ditanyakan itu madrasah yang baru mau berdiri, kita kan sudah lama jadi pedomannya tahun yang sudah berjalan atau sedang berjalan kita evaluasi kemudian kita buat jadi kebijakan untuk yang akan datang”.⁶⁰

Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh kepala madrasah bahwa kebijakan tidak perlu divalidasi cukup dievaluasi saja.

”Kan kebijakan itu berdasarkan analisis SWOT, ketika membuat analisis SWOT itu kita sudah melibatkan guru-guru kita melibatkan yayasan disitu banyak orang-orang pintar juga ada komite madrasah. Dari analisis SWOT kemudian dilahirkan rencana strategis baru kita turunkan rencana strategis gitu, kalau menurut saya tidak perlu divalidasi cukup dievaluasi saja nanti dipraktekkan dalam satu tahun baru dievaluasi seperti itu. Orang saya membuat renstra itu sudah analisis SWOT, analisis SWOT itu sudah berdasarkan fakta di lapangan, apa selama ini yang menjadi kelemahan? Apa yang selama ini menjadi kelebihan? Kan sudah berdasarkan evaluasi jadi tidak perlu divalidasi orang itu sudah valid sudah terjadi juga di lapangan. Divalidasi itu kalau di lapangan kamu tidak tahu yang terjadi di lapangan baru divalidasi kalau sudah terjadi di lapangan untuk apa divalidasi orang itu sudah valid logika validasinya tidak ketemu karna itu sudah refleksi evaluasi, refleksi kan saya sudah tahu saya buat kebijakan setahun kedepan, saya sudah tau nih selama setahun jadi ya tidak perlu dicoba karena sudah jalan, lalu di cek apa problem anak gimana anak kenapa tidak berprestasi kan sudah tahu penyebabnya terus bagaimana mengatasi kekurangan itu merubah kelemahan menjadi kekuatan, merubah ancaman menjadi peluang, kan saya sudah tahu cuma itu cara baca saya maka kemudian saya melibatkan banyak orang, anggota, komite dan yayasan biar yang baca itu banyak. Mungkin bacaan saya kurang pas maka perlu kita diskusi bagaimana nih menurut yang lainnya kan ada diskusi ada *brainstorming* gitu itu analisis SWOT makanya tidak perlu validasi. Kita kan ada pertemuan rutin tim pengembang kurikulum, kita punya mapel misalkan aswaja (ahli sunah wal jamaah) itu beda dengan yang lain kita semua berbasis arab tapi memang tidak dibuka untuk umum kita belum launching kemana-mana khusus internal saja, jadi ahli sunah wal jamaah itu belum kita ajarkan ke anak-anak itu salamnya Rasulullah Muhammad

⁶⁰ Basyaruddin Maisir, wawancara dengan penulis, Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah Bandar Lampung, Bandar Lampung, 17 Mei 2019

SAW tapi mereka harus punya hujjah harus punya dasar semua, biar tidak gampang dikritik orang dan mereka yakin artinya anak keluar kemasyarakat itu sudah lengkap dengan argumentasi ilmiah, ya kita siapkan contoh misalkan ahli sunah wal jamaah ini apa dari devinisi oh ahli sunah waljamaah itu adalah yang sistem teologinya mengikuti pemikiran Abu Hassan Ali Al Asy'ari Abu Mansur Al Maturidi kita ajari teologinya, terus kemudian tasawufnya ikut imam junaid Al-Baghdadi dan imam ghazali ya kita ajarkan".⁶¹

Berdasarkan pernyataan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan setiap akhir tahun ajaran dilakukan evaluasi untuk mengetahui kebijakan yang tahun ini diterapkan apakah berjalan semua atau tidak dan apa saja kendala yang perlu diperbaiki untuk selanjutnya dirumuskan menjadi kebijakan di tahun yang akan datang. Jadi kebijakan yang dibuat sudah berdasarkan evaluasi dari setiap tahunnya.

B. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 17 April 2019 sampai dengan 17 Mei 2019 di Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah Bandar Lampung, peneliti mendapatkan temuan sebagai berikut, diantaranya ialah:

1. Kebijakan Harus Disesuaikan Dengan Keadaan Masyarakat Madrasah dan Lapangan

Pada temuan yang didapatkan peneliti tentang kebijakan pendidikan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat madrasah dan lapangan.

⁶¹ Abdul Aziz, wawancara dengan penulis, Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah Bandar Lampung, Bandar Lampung, 12 April 2019

Peran kebijakan itu sangat penting untuk menentukan arah serta jalur dalam proses pendidikan. Yang terpenting untuk kebijakan itu yang pertama untuk meningkatkan bahan bakunya yaitu peserta didik, guru maupun fasilitas sarana prasarana (sarpras).

Dalam kebijakan, visi dan misi merupakan hal yang mutlak adanya di sebuah lembaga pendidikan formal karena visi dan misi adalah cerminan profil madrasah yang diinginkan dimasa yang akan datang. Dalam menentukan visi dan misi, madrasah harus mampu melihat dan memperhatikan perkembangan dan tantangan dimasa yang akan datang. Di Madrasah Aliyah Al-Hikmah sendiri dalam perumusan visi dan misi sudah disesuaikan dengan kebutuhan dimasa yang akan datang. Seperti contohnya visi di Madrasah Aliyah Al-Hikmah “Terwujudnya Lembaga Pendidikan Berbasis Pondok Pesantren yang Unggul dan Berprestasi di Tingkat Nasional tahun 2021” dan salah satu misinya yaitu “Menyelenggarakan pendidikan pondok pesantren yang bermutu dan berkualitas” dalam pengaplikasiannya kebijakan yang ditetapkan madrasah salah satunya menjaga agar identitas kepesantrenannya tidak hilang yaitu dengan cara menyelip-nyelipkan materi keagamaan seperti fiqih, akhlak, aqidah, aqidah akhlak. Untuk tenaga pengajar/guru mereka dianjurkan menggunakan

sumber langsung seperti kitab kuning, untuk fiqih menggunakan kitab fathul qorib dan sebagainya. Kebijakan untuk guru-guru agama disamping alumni dari UIN juga harus yang dari pesantren karena mereka menguasai kitab-kitab klasik diamping kitab-kitab kontemporer.

2. Kebijakan Telah Diuji Coba di Lapangan

Kebijakan di Madrasah Aliyah Al-Hikmah telah diuji coba dilapangan di lapangan, kepala madrasah merancang kebijakan sudah berdasarkan renstra, dan renstra sudah berdasarkan analisis SWOT dan analisis SWOT sudah berdasarkan fakta dilapangan.

Kebijakan perlu divalidasi jika tidak tau apa yang terjadi dilapangan, sedangkan Madrasah Aliyah Al-Hikmah adalah madrasah yang sudah lama didirikan sehingga untuk validasi tidak perlu dilakukan karena kepala madrasah sudah tau apa yang terjadi dilapangan dan juga sudah membuat kebijakan untuk setahun kedepan dan sudah berjalan.

3. Dilakukan Evaluasi Secara Berkala

Kebijakan perlu dievaluasi setiap akhir tahun ajaran, dari evaluasi dapat diketahui kendala-kendala yang terjadi selama satu tahun hingga akhirnya dapat merumuskan ulang kebijakan untuk tahun ajaran berikutnya. Dari evaluasi inilah dapat dilihat apakah kebijakan yang dibuat memiliki

manfaat atau tidak bagi masyarakat madrasah. Evaluasi merupakan tahap akhir karena evaluasi dalam evaluasi ini dapat diketahui berhasil tidaknya kebijakan ataukah perlu perbaikan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan hasil penelitian dan analisis bab sebelumnya, maka penelitian mengenai Kebijakan Pendidikan Dalam Mengaplikasikan Visi dan Misi di Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah Bandar Lampung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan di MA Al-Hikmah Bandar Lampung untuk guru mereka menentukan selain alumni dari UIN mereka juga harus dari pesantren. Visi dan misi merupakan profil sekolah yang diinginkan dimasa yang akan datang. Untuk mengaplikasikan visi misi madrasah memasukkan materi keagamaan seperti fiqih, ushul fiqih, akhlak, aqidah akhlak dan untuk referensi mereka mewajibkan menggunakan sumber langsung kitab kuning, untuk fiqih menggunakan kitab fathul qorib.
2. Kebijakan telah diuji coba dilapangan karena kepala madrasah membuat kebijakan sudah berdasarkan renstra dan renstra berdasarkan analisis SWOT, analisis SWOT itu sudah berdasarkan fakta dilapangan. Perlu diuji di lapangan itu jika kita belum tahu kondisi di madrasah seperti apa atau

sekolah yang baru saja dibangun. Sedangkan kepala madrasah sendiri sudah tahu keadaan di madrasah seperti apa.

3. Evaluasi dilakukan secara berkala, evaluasi dilakukan setiap akhir tahun ajaran karena dari evaluasi akan nampak apakah ada kendala-kendala dari kebijakan sebelumnya, maka setelah itu perlu adanya perbaikan untuk kebijakan di tahun yang akan datang.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan pemeriksaan kesimpulan yang ada, maka penulis memberikan sumbangan pemikiran melalui saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Madrasah Aliyah (MA) kebijakan harus disesuaikan dengan keadaan di lapangan, dalam pembuatan kebijakan harus melihat factor-faktor yang ada dilapangan.
2. .Untuk penelitian selanjutnya perlu ditanamkan bahwa penelitian ini belum bisa dikatakan final, karena masih banyak kekurangan didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 12 April 2019
- Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Ali Mufiz, *Pengantar Administrasi Negara*, Jakarta: Universitas Terbuka Debdikbud, 1999
- Barnawi, *Buku Pintar Mengelola Sekolah*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012
- Basyaruddin Maisir, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 17 Mei 2019
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Cynthia D. Scott, dkk., *Organizational Vission, and Mission*, terj. Ati Cahayani, *Visi, Nilai, dan Misi organisasi*, Jakarta: Indeks, 2010
- Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015
- M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Masykuri Bakri, *Metode Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktek* Surabaya: Visipress Media, 2009
- Muhaimin, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2009
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, bab 14, pasal 51
- Restu Kartiko Widi, *Asas Metologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Saiful Sagala, “Pengantar”, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung Alfabeta. 2013

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007

Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010

Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012





Lampiran 1

KISI-KISI PENELITIAN

No	Komponen	Indikator	Alat Pengumpulan Data	Informan
1.	Kebijakan pendidikan di madrasah	<p>a. Kebijakan harus sesuai dengan keadaan masyarakat madrasah dan lingkungan</p> <p>b. Kebijakan sudah teruji di lapangan</p> <p>c. Dilakukan evaluasi secara berkala</p>	<p>a. Wawancara</p> <p>b. Observasi</p> <p>c. Dokumentasi</p>	<p>a. Kepala madrasah</p> <p>b. Ketua yayasan</p>

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Instrumen Wawancara Dengan Kepala Madrasah dan Ketua Yayasan

1. Apakah kebijakan yang ada di madrasah dibuat oleh kepala madrasah atau kepala yayasan?
2. Siapa sajakah actor yang berperan dalam kebijakan pendidikan dan bagaimana peran masing-masing actor tersebut?
3. Bagaimana cara bapak merumuskan kebijakan di MA Al-Hikmah?
4. Bagaimana kepentingan sekolah memberikan pengaruh terhadap proses perumusan kebijakan di MA Al-Hikmah?
5. Bagaimana langkah bapak dalam mengambil keputusan?
6. Bagaimana proses penetapan kebijakan di MA Al-Hikmah?
7. Sebelum kebijakan divalidasi apakah dilakukan tes terlebih dahulu di lapangan atukah langsung diaplikasikan di madrasah?
8. Bagaimana bentuk kebijakan dalam usaha menjadikan MA Al-Hikmah sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren yang unggul dan berprestasi di tingkat nasional tahun 2021?
9. Bagaimana bentuk kebijakan di MA AL-Hikmah dalam menyelenggarakan pendidikan pondok pesantren yang berkarakter dan berkualitas?

Lampiran 3

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati konsep visi dan misi di MA Al-Hikmah
2. Mengamati kebijakan sekolah dalam menjadikan MA Al-Hikmah sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren yang unggul dan berprestasi
3. Mengamati implementasi kebijakan sekolah dalam mewujudkan misi



Lampiran 4

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Madrasah (Bpk. Abdul Aziz)



Wawancara dengan Bapak Basyaruddin Maisir (Ketua Yayasan)



Ruang Guru



Ruang Tamu



Ruang Kelas



Gedung Lab. Bahasa dan Lab. Komputer



Lab. Komputer



Kegiatan siswa/i awal tahun



Suasana kegiatan diskusi siswa/i



Lampiran 5

DOKUMEN PENDUKUNG
PROFIL
MADRASAH ALIYAH (MA) AL HIKMAH

A. PROFIL MADRASAH

1. Nama : Madrasah Aliyah (MA) Al Hikmah Kedaton
2. No Statistik Madrasah : 131218710001
3. NPSN : 10648356
4. Akreditasi Madrasah : B
5. Alamat Lengkap : Jl. Sultan Agung Gg. Raden Saleh Nomor 23
Kelurahan : Kedaton
Kecamatan : Kedaton
Kota : Bandar Lampung
Provinsi : Lampung
No. Telp. : 0721 - 700992
6. NPWP Madrasah : 00.812.257.4-323.000
7. Nama Kepala Madrasah : Abdul Aziz, SH., S. Pd.I.
8. No. Telp / HP : 081369664183 / 081540882562
9. Nama Yayasan : Yayasan Al Hikmah Bandar Lampung
10. Alamat Yayasan : Jl. Sultan Agung Gg. Raden Saleh Nomor 23
Kelurahan : Kedaton
Kecamatan : Kedaton
Kota : Bandar Lampung

Provinsi : Lampung

11. No. Telp Yayasan : 0721 - 700992

12. No. Akte Pendirian Yayasan : 32

13. Kepemilikan Tanah : Wakaf

14. Luas Tanah : 1.200 M²

15. Status Bangunan : Swadaya dan bantuan swakelola

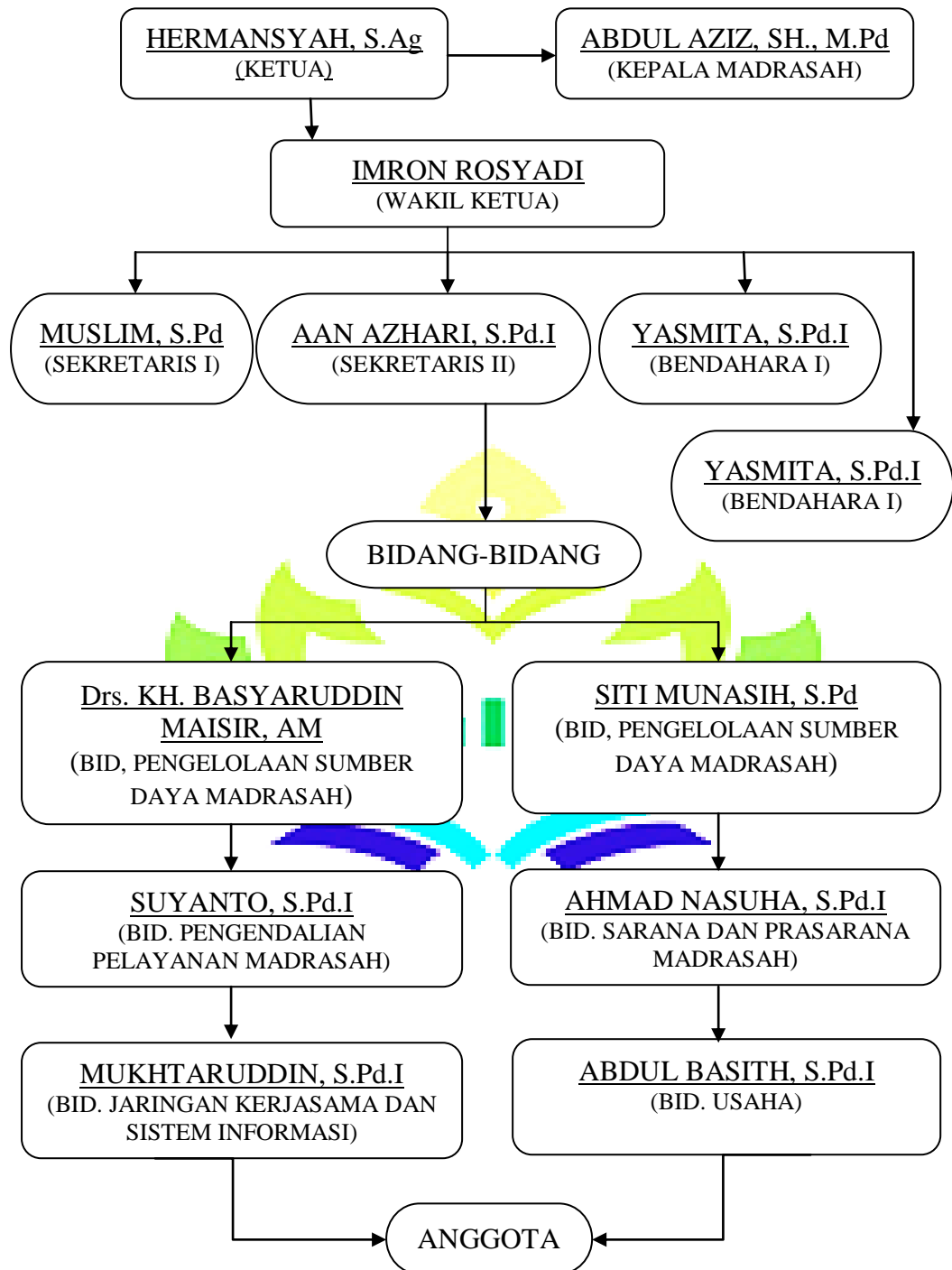
16. Luas Bangunan : 800 M²



Struktur Organisasi MA Al-Hikmah Bandar Lampung



Struktur Organisasi Komite MA Al-Hikmah Bandar Lampung



**PENDIDIK DAN TENAKA KEPENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH AL HIKMAH
JL. SULTAN AGUNG Gg. RADEN SALEH NO. 23 KEDATON BANDAR LAMPUNG
Tahun Pelajaran 2018 / 2019**

No	Nama	Jabatan
1	Abdul Aziz, SH. , M.Pd.I	Kepala Madrasah
2	Muhtaruddin, S. Pd. I.	Waka Kurikulum
3	Suyanto, S.Pd.I.	Waka Kesiswaan
4	Vestiana Anistasea, S. Pd	Kepala TU
5	Aan Azhari, S. Pd I	TU
6	Yasmiyati, S. Pd I	Bendahara
7	Drs. Hi. Basyaruddin Maisir	Guru
8	Abdul Basith, S.Pd.I.	Guru
9	M. Yahya, S.Ag.	Guru
10	Hermansyah, S.Ag.	Guru
11	Dra.Nurhayati, M.Pd.I.	Guru
12	Uliyah, S.Pd.I.	Guru
13	Sri Latifah, M.Sc.	Guru
14	Annggun Novita Sari, S.Si	Guru
15	Yayan Mulyana, S.Pd.	Guru
16	Jumiati, S.Pd.	Guru
17	Sundari, S.Pd.	Guru
18	Sanora Putri Utami, S.Pd	Guru
19	Siti Komariah, S. Pd	Guru
20	Saiful Abdul Jamal, SE.	Guru
21	Anita Lisdiana, S. Sos. I	Guru
22	Eliyana, S.Pd.	Guru
23	Okta Kurniawan, S. Pd.	Guru
24	Siti Masyitoh, M.Pd.	Guru
25	Iswahyudi, S.Si.	Guru
26	Rohati, A.Md.	Guru
27	Miswanto, M. HI	Guru
28	Nofviyanti, M. Pd	Guru
29	Abdul Kholik	OB
30	JOJO	Satpam

Bandar Lampung, 4 Juli 2018
Mengetahui
Kepala Madrasah

Abdul Aziz, SH, M. Pd. I

JADWAL PELAJARAN
MADRASAH ALIYAH AL HIKMAH KEDATON BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019

JAM	WAKTU	SENIN										SELASA							RABU							KAMIS							JUMAT							SABTU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		XPMIA	X PIS	X PIK	XI IPA	XI IPS	XI Ag	XII IPA	XII IPS	XII Ag	XPMIA	X PIS	X PIK	XI IPA	XI IPS	XI Ag	XII IPA	XII IPS	XII Ag	XPMIA	X PIS	X PIK	XI IPA	XI IPS	XI Ag	XII IPA	XII IPS	XII Ag	XPMIA	X PIS	X PIK	XI IPA	XI IPS	XI Ag	XII IPA	XII IPS	XII Ag	XPMIA	X PIS	X PIK	XI IPA	XI IPS	XI Ag	XII IPA	XII IPS	XII Ag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
I	07.00	Upacara										Tadarus Al Qur'an / Asmaul Husna																	Asmaul Husna							Asmaul Husna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	07.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	07.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	07.50										AA	S	A	M	Fqh	PJO	BA	M	IK	SB	BA	TIT	M	PJO	Bing	TIK	E	A	BInc	Pjo	FUH	AH	pkn	Bing	Fis	SI	BA	SKI	SB	AH	B	G	IK	PJO	SI	PKn	M	BInc	S	F	E	pkn	Fis	PJO	FUF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											25	6	4	11	7	20	2	23	1	24	2	5	11	20	12	27	17	4	13	20	7	8	3	12	10	18	22	3	24	8	19	1	6	20	18	25	11	13	6	23	15	3	10	20	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
II	07.50	B	BInc	SI	Bing	PK	HIH	SKI	S	BA	AA	S	A	M	Fqh	PJO	BA	M	IK	SB	BA	TIT	M	PJO	Bing	TIK	E	A	BInc	Pjo	FUH	AH	pkn	Bing	Fis	SI	BA	SKI	SB	AH	B	G	IK	PJO	BA	PKn	M	BInc	S	F	E	pkn	Fis	PJO	FUF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	08.24	19	13	18	12	24	8	3	6	22	25	6	A	11	7	20	2	23	1	24	2	5	11	20	12	27	17	4	13	20	7	8	3	12	10	18	22	3	24	8	19	1	6	20	2	25	11	13	6	23	15	3	10	20	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	08.24	B	BInc	SI	Bing	PK	HIH	SKI	S	BA	SI	S	Bing	Fqh	M	TIT	M	SKI	IK	BInc	BA	B	SB	Bing	BA	AH	E	A	Pjo	M	BInc	K	AA	FUH	Mtc	Bing	M	AH	B	SKI	PK	G	IK	K	BA	Bing																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Keterangan:

1	Abdul Aziz, SH., M.Pd.I.	11	Anggun Novita sari, S.Si	20	Okta Kurniawan, S. Pd
2	Muhtaruddin, S. Pd I	12	Yayan Mulyana, S.Pd	21	Siti Munasih, S. Pd
3	Suyanto, S.PdI	13	Jumiati, S. Pd	22	Siti Masyitoh, M.Pd.I
4	Drs.Hi Basyaruddin Maisir	14	Sundari, S. Pd	23	Iswahyudi, S.Si.
5	Abdul Basith, S. Ag	15	Sanora Putri Utami, S.Pd	24	Rohati, Amd
6	M. Yahya, S.Ag	16	Siti Komariah, S. Pd	25	Miswanto, S.H.I
7	Hermansyah, S.Ag	17	Saiful Abdul Jamal, SE	26	Yasmiyati, S. Pd I
8	Dra. Nurhayati, M.Pd.I	18	Anita Lisdiana, S. Sos. I	27	Agus Dinayah
9	Uliyah, S.Pd.I	19	Eliyana, S. Pd	28	Vestiana Anistasea, S. Pd
10	Sri Latifah, M.Sc				

Wali Kelas:

1	Jumiati, S.Pd
2	Iswahyudi, S.Pd
3	Sanora Putri Utami, S. Pd
4	Dra . Nurhayati, M.Pd.I
5	Anggun Novita sari, S.Si
6	Uliyah, S.Pd.I
7	Miswanto, M. HI
8	Elliyana, S. Pd
9	Yayan Mulyana, S.Pd

Guru Piket:

Senin	Vestiana Anistasea, S. Pd
Selasa	Siti Munasih, S.Pd
Rabu	Sanora, S.Pd
Kamis	Anggun Novita sari, S.Si
Jum'at	Iswahyudi, S.Si
Sabtu	Sundari, S. Pd

Bandar Lampung, 16 Juli 2018

Waka. Kurikulum

Mengetahui,
Kepala Madrasah

Abdul Aziz, SH., MPdI

Muhtaruddin, S. Pd. I

STRUKTUR KURIKULUM MADRASAH ALIYAH AL HIKMAH TP 2018 - 2019
JL. SULTAN AGUNG Gg. RADEN SALEH NO. 23 KEDATON BANDAR LAMPUNG

No	Nama	Mata Pelajaran	Alokasi Waktu										Keterangan	Beban mengajar	Beban Mengajar sertifikasi
			X PMIA	X.PIS	X.PIK	XI.IPA	XI.IPS	XI.Keag	XII.IPA	XII.IPS	XII.Keag	JML			
1	Abdul Aziz, SH. , M.Pd.I	Geografi (G)		3*			3			3		9	Ka. Madrasah (18 Jam)	32	27
		PPKn							2			2			
		Ilmu Kalam (IK)									3	3			
2	Muhtaruddin, S. Pd. I.	Bahasa Arab (BA)	3	3		2	2		2	2		14	Waka Kur 12 jam	26	26
3	Suyanto, S.Pd.I.	SKI	2	2	2			2	2	2	2	14	Wakasis (12 Jam)	32	26
		PPKn				2	2	2				6			
4	Drs. Hi. Basyaruddin Maisir	Akidah Akhlak (AA)				2	2					4		12	12
		Akhlak (A)			2*			3			3	8			
5	Abdul Basith, S.Pd.I.	Manthiq (Mtq)							2	2	2	6		13	0
		Tafsir - Ilmu Tafsir (TI)	2**		2*			3				7			
6	M. Yahya, S.Ag.	Sosiologi (S)	2**	3*	2**		3			3		13	Ka perpustakaan (12 Jam)	36	24
		Ilmu Kalam (IK)			2			3				5			
		Aswaja (ASJ)				2	2	2				6			
7	Hermansyah, S.Ag.	Fikih - Ushul Fikih (FUF)			2*			3			3	8	-	24	24
		Fikih (Fqh)	2	2	2	2	2		2	2		14			
		Fikih - Ushul Fikih (FUF)	2**									2			
8	Dra.Nurhayati, M.Pd.I.	Al Qur'an Hadis (A H)	2	2	2	2	2		2	2		14	BBQ 2 jam. Wakel XI Keag	24	24
		Hadis (H)			2*			3			3	8			
9	Uliyah, S.Pd.I.	B.Indonesia (B.In)				4	4	4				12	Wakel XI IPS	12	0
10	Sri Latifah, M.Sc.	Fisika (F)							4			4	-	4	0
11	Annggun Novita Sari, S.Si	Matematika (M)	4			4	4	4				16	Wakel XI. IPA	19	0
		Matematika (M)	2*									3			
12	Yayan Mulyana, S.Pd.	Bahasa Inggris (B.Ing)				4	4	4	4	4	4	24	Wakel XII. IPS	24	24
13	Jumiaty, S.Pd.	Bahasa Indonesia (B.In)	4	4	4				4	4	4	24	Wakel X.PIK	24	24
14	Sundari, S.Pd.	Matematika (M)		4	4							8		12	0
15	Sanora Putri Utami, S.Pd	Ekonomi (E)		3*	2**		4					9	Wakel X. PIS	15	0
		PPKn	2	2	2							6			
16	Siti Komariah, S. Pd	Kimia (K)	3*			4			4			11	-	11	0
17	Saiful Abdul Jamal, SE.	Ekonomi (E)								4		4	-	4	0
18	Anita Lisdiana, S. Sos. I	Sejarah Indonesia (SI)	2	2	2							6		16	0
		Sejarah Indonesia (SI)	2*			1	3		1	3		10			
19	Eliyana, S.Pd.	Biologi (B)	3*	2**	2**	4			4			15	Bimbingan praktikum	17	17
20	Okta Kurniawan, S. Pd.	Penjas , Orkes (PJO)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18	-	21	0
21	Siti Munasih, S.Pd.	B. Inggris (B.Ing)	2	2	2							6		6	0
22	Siti Masyitoh, M.Pd.	Bahasa Arab			2*							2		15	0
		Bahasa Arab (BA)			2			4			4	10			
		Tafsir - Ilmu Tafsir (TIT)									3	3			
23	Iswahyudi, S.Si.	Fisika (F)	3*			4						7	Ka Lab.IPA (12 jam), Wakel X.PMIA	31	0
		Matematika							4	4	4	12			
24	Rohati, A.Md.	Seni Budaya (SB)	2	2	2	2	2	2				12	-	24	0
		Prakarya dan Kewirausahaan (PK)	2	2	2	2	2	2				12			
25	Miswanto, M. HI	Akidah Akhlak (AA)	2	2	2				2	2		10	-	18	0
		Akhlak (A)	2**	2**								4			
		PPKn								2	2	4			
26	Yasmiyati, S. Pd I	B. Lampung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		9	
27	Agus Dinayah Nur R. S. Pd	TIK							2	2	2	6		6	
28	Vestiana Anistasea, S. Pd	Seni Budaya (SB)							2	2	2	6		6	
	Pengembangan diri		2	2	2	2	2	2	2	2	2	18			
Jumlah			51	51	51	46	46	46	48	48	46	405		493	228

et : * mata pelajaran peminatan , ** Mata Pelajaran lintas minat

Mengetahui Kepala

Abdul Aziz, SH, M. Pd. I

Bandar Lampung, 16 Juli 2018

Waka. Kurikulum

Muhtaruddin, S Pd I

DAFTAR NAMA GURU NON-PNS PADA MADRASAH ALIYAH AL HIKMAH

Kabupaten / Kota : Bandar Lampung
 Propinsi : Lampung

NO	Nama Lengkap	Tempat dan Tanggal Lahir		Pendidikan Terakhir	NUPTK	Masa Kerja (Tahun)	Sertifikasi	Madrasah Tempat Tugas Utama					Mata Pelajaran	Beban Kerja (JTM)			Jabatan / Tugas tambahan	Total Beban Kerja per minggu	No Rekening
								NSM	Nama Madrasah	Alamat Madrasah	Telp	Kec.		Pada Satminkal	Satuan Pendidikan Lain	Tugas Tambahan	Nama Jabatan		
1	Drs.Hi.Basyaruddin M	Wonosobo	01/11/1963	S1 IAIN	5844 7416 4220 0062	1986	Sudah	312187108003	Madrasah Aliyah PonPes Al Hikmah	Jl. Sultan Agung Gg. Raden Saleh No.23	08287215104	Kedaton	AA & Tasawuf	11	-	14	Ka.Lab Bahasa & BBQ	25	114-00-0533441-5
2	M.Yahya, S.Ag	Kudus	17/02/1972	S1IAIN	1549 7506 5120 0001	1998	Sudah						Sosio & KeNUan	24	-	-	-	24	114-00-0533505-7
3	Siti Munasih, S.Pd	Tj. Karang	27/07/1975	SI UNILA	8059 7536 5530 0023	2001	Sudah						Bahasa Inggris	12	12	-	-	24	114-00-0533446-4
4	Hermansyah, S.Ag	L.Maringgai	10/12/1971	S1 IAIN	9542 7496 5120 0053	2002	Sudah						Fiqh & Hadits	21	-	4	Peng.Diri Bahasa & BBQ	25	114-00-0533454-8
5	Abdul Aziz, SH	Lumajang	12/04/1976	S1 UNISMA	3744 7546 5820 0002	2002	Sudah						Geografi	12	-	18	Ka. Madrasah Aliyah	30	114-00-0533460-5
6	Abdul Basith	Kudus	08/08/1968	MA PONPES	8140 7466 4720 0033	2002	Belum						Tafsir, Mantiq, B.arb & Falaq	20	-	4	Pembina Rohis & SBI	24	114-00-0533465-4
7	Jumiatl, S.Pd	Tj. Karang	09/02/1979	S1 UNILA	2541 7576 5830 0022	2004	Sudah						Bahasa Indonesia	27	-	-	-	27	114-00-0533484-5
8	Ressy, A.Md	Lahat	15/02/1982	D3 A2L	1547 7606 6230 0062	2005	Belum						Ekonomi	11	-	14	Ka.Lab. Kom & Fiqunisa	25	114-00-0533489-4
9	Sundari, S.Pd	Kerta Mulia	11/08/1982	S1 STKIP	5149 7606 6230 0043	2005	Sudah						MTK	12	12	-	-	24	114-00-0533493-6
10	Darwin Azhari, S.Pd	Talang Padang	18/05/1973	S1 UNILA	8850 7516 5320 0022	2007	Sudah						Kimia	16	8	-	-	24	114-00-0533616-2
11	Sri Latifah, S.Pd	Kebumen	21/03/1979	S1 UNES	4653 7576 5830 0022	2005	Sudah						Fisika	16	-	12	Waka. Kurikulum	28	114-00-0647073-9
12	Suyanto,S.Pd.I	Labuhan Ratu	02/06/1978	S1.IAIN	6934 7566 6020 0002	2008	Belum						SKI & PKn	16	-	12	Waka. Kesiswaan	28	114-00-0631589-2
13	Eliyana, S.Pd	Negararatu	01/07/1979	S1 UNILA	5439 7576 5730 0012	2010	Sudah						Biologi	16	-	12	Ka. Lab. IPA	28	114-00-0711101-9
14	Saiful Abdul Jamal, SE	Slaman	24/01/1961	S1 P.Bangsa	0456 7446 4630 0042	2008	Sudah						Ekonomi	6	18	-	-	24	Baru

Bandar Lampung, 8 Maret 2018
 Kepala Madrasah

Abdul Aziz, SH, S.PdI

**DAFTAR USULAN CALON PENERIMA SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL BAGI GURU BUKAN PNS (STF-GBPNs)
TAHUN 2016**

NO	Nama Lengkap	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	L/P	NAMA RA/ MADRASAH SATMIKAL	Nomor dan Tanggal SK/Pengangkatan Sebagai Guru Tetap	LAMA MENGAJAR (TAHUN)	BIDANG STUDI YANG DIAMPU	Total Beban Kerja per minggu
1	Abdul Aziz, SH	Lumajang	12/04/1976	L	MA AL HIKMAH	35/SK/YPPI.A/VII/2011	10	Geografi/Ka Madrasah	30
2	Abdul Basith	Kudus	08/08/1968	L	MA AL HIKMAH	32/SK/YPPI.A/VII/2011	10	Tafsir, Mantiq, B.arb & Falaq	24
3	Darwin Azhari, S.Pd	Talang Padang	18/05/1973	L	MA AL HIKMAH	67/SK/YPPI.A/VII/2011	5	Kimia	24
4	Drs.Hi.Basyaruddin M	Wonosobo	01/11/1963	L	MA AL HIKMAH	14/SK/YPPI.A/VII/2011	26	AA & Tasawuf/Ka. Lab Bahasa	25
5	Eliyana, S.Pd	Negararatu	01/07/1979	P	MA AL HIKMAH	80/SK/YPPI.A/VII/2011	2	Biologi/ Ka.Lab. IPA	28
6	Hermansyah, S.Ag	L.Maringgai	10/12/1971	L	MA AL HIKMAH	31/SK/YPPI.A/VII/2011	10	Fiqih & Hadits	25
7	Iswahyudi, S.Pd	Branti	18/8/1981	L	MA AL HIKMAH	109/SK/YPPI.A/XI/2011	1	Fisika	24
8	Jumiati, S.Pd	Tj. Karang	09/02/1979	P	MA AL HIKMAH	46/SK/YPPI.A/VII/2011	6	Bahasa Indonesia	27
9	M.Yahya, S.Ag	Kudus	17/02/1972	L	MA AL HIKMAH	20/SK/YPPI.A/VII/2011	14	Sosio & KeNUan	24
10	Sanora Putri Utami, S.Pd	B. Lampung	16/4/1989	P	MA AL HIKMAH	109/SK/YPPI.A/VII/2011	1	Ekonomi	15
11	Siti Masyithoh, S.Pd.I	B. Lampung	11/02/1981	P	MA AL HIKMAH	95/SK/YPPI.A/XI/2011	4	Tafsir , Hadist,b. Arab	24
12	Siti Munasih, S.Pd	Tj. Karang	27/07/1975	P	MA AL HIKMAH	29/SK/YPPI.A/VII/2011	11	Bahasa Inggris/WaKa Kurikulum	24
13	Sundari, S.Pd	Kerta Mulia	11/08/1982	P	MA AL HIKMAH	54/SK/YPPI.A/VII/2011	7	MTK	24
14	Suyanto,S.Pd.I	Labuhan Ratu	02/06/1978	L	MA AL HIKMAH	69/SK/YPPI.A/VII/2011	4	SKI & PKn/WaKa Kesiswaan	28
15	Vestiana Anistasia, S.Pd	B. Lampung	02/09/1986	P	MA AL HIKMAH	110/SK/YPPI.A/II/2011	1	Ekonomi / TU	6

Bandar Lampung, 7 April 2016
Kepala Madrasah

Abdul Aziz, SH, S.PdI

**DAFTAR HADIR GURU DPK MA AL HIKMAH
TAHUN PELAJARAN 2018-2019**

Bulan :

NO	NAMA	NIP	TANGGAL																															JUMLAH		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	H	I/S	A
1	Yayan Mulyana, S.Pd	IV a. 197001121999031003																																		
2	Dra. Nurhayati, M.Pd.I	IV a. 196212221991032001																																		

Bandar Lampung.....
Kepala MA.Al Hikmah

Abdul Aziz, SH, MPdI



REKAPITULASI DAFTAR HADIR MADRASAH ALIYAH AL HIKMAH TAHUN PELAJARAN 2018-2019

Bulan :

No	Nama	Tanggal																															Ket			kehadira			Jml
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	s	i	a	s	i	a	
1	Aan Azhari, S. Pd I																																						
2	Abdul Aziz, SH,M.Pd.I																																						
3	Abdul Basith, S. PdI																																						
4	Ahmad Sukandi, M.H.I																																						
5	Anggun Novita Sari, S.Si																																						
6	Anita Lisdiana, S.Si																																						
7	Dra. Nurhayati, M.Pd																																						
8	Drs Hi. Basyaruddin Maisir																																						
9	Elliyana, S. Pd																																						
10	Hermansyah, S. Ag																																						
11	Iswahyudi, S.Pd																																						
12	Jumiati, S. Pd																																						
13	Miswanto, M.H.I																																						
14	Moh Yahya, S. Ag																																						
15	Muktarruddin,S.Pd.I																																						
16	Nofviyanti, M.Pd																																						
17	Nur'aini, S.Pd																																						
18	Nurul Watifah, M.Pd																																						
19	Okta Kurniawan, S. Pd																																						
20	Rohati, A.Md. Kep																																						
21	Saiful Abdul Jamal, S.E																																						
22	Siti Komariah, S. Pd																																						
23	Sri Latifah, M.Sc																																						
24	Sundari, S. Pd																																						
25	Suyanto, S.Pd.I																																						
26	Vestiana Anistasia, S.Pd																																						
27	Yasmiyati, S.Pd.I																																						
28	Yayan Mulyana, S. Pd																																						
29	Yudi Prayoga, S.Ag																																						

Mengetahui,
Kepala Madrasah Aliyah Al Hikmah

Abdul Aziz, SH. M. Pd.I

Bandar Lampung, 2018

Waka. Kurikulum

Muhtarudin, S.Pd.I



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

KARTU KONSULTASI

Nama : Boni Wijayanti
NPM : 1511030134
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Judul Skripsi : **Kebijakan Pendidikan Dalam Mengaplikasikan Visi dan Misi di Madrasah Aliyah (MA) Al-Hikmah Bandar Lampung**

No	Waktu Konsultasi	Masalah yang Dikonsultasikan	Paraf Pembimbing	
			Pemb. I	Pemb. II
1	Okt-18	Pengajuan Proposal	
2	Okt-18	Acc Proposal	
3	Okt-18	Pengajuan Proposal	
4	Nov-18	Perbaikan Proposal	
5	Des-18	Perbaikan Proposal	
6	Des-18	Acc Proposal	
7	Jan-18	Seminar Proposal
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Bandar Lampung, 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Eti Hadiati, M.Pd
NIP. 196407111991032003

Dr. Safari, M.Sos.I
NIP. 197508012002121003